



# RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2021-2026



**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko  
Kode Pos 38364



## KATA PENGANTAR

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud undang-undang, disusun oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026. Diharapkan Dokumen ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Mukomuko.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>IV</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>VI</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>Bab I-1</b>
1.1    Latar Belakang.....	Bab I-1
1.2    Landasan Hukum.....	Bab I-2
1.3    Maksud dan Tujuan.....	Bab I-5
1.4    Sistematika Penulisan.....	Bab I-6
<b>BAB II     GAMBARAN UMUM PELAYANAN INSPEKTORAT</b>	<b>Bab II-1</b>
<b>DAERAH.....</b>	
2.1    Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah.....	Bab II-1
2.2    Sumber Daya Inspektorat Daerah.....	Bab II-7
2.3    Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.....	Bab II-21
2.4    Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah.....	Bab II-29
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b>	<b>Bab III-1</b>
<b>INSPEKTORAT DAERAH.....</b>	
3.1    Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	Bab III-1
3.2    Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	Bab III-9
3.3    Telaah Renstra Kabupaten Mukomuko.....	Bab III-11
3.4    Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	Bab III-12
3.5    Penentuan Isu-Isu Strategis.....	Bab III-10
<b>BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH.....</b>	<b>Bab IV-1</b>

4.1	Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko.....	Bab IV-1
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah.....	Bab IV-1
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INSPEKTORAT DAERAH.....</b>	Bab V-1
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT DAERAH.....</b>	Bab VI-1
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAN INSPEKTORAT DAERAH.....</b>	Bab VII-1
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP.....</b>	Bab VIII-1

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil, Honor Daerah, Tenaga Kerja Sukarela Tahun 2021.....	Bab II-7
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Status Kepegawaian dan Tingkat Golongan Tahun 2021.....	Bab II-9
Tabel 2.3	Data Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural Tahun 2021.....	Bab II-10
Tabel 2.4	Neraca Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020.....	Bab II-12
Tabel 2.5	Data Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Per 31 Desember 2020.....	Bab II-13
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 - 2021.....	Bab II-22
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2016 - 2020.....	Bab II-26
Tabel 3.1	Data Analisis Jabatan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko.....	Bab III-2
Tabel 3.2	Dokumen Tata Ruang Kabupaten Mukomuko.....	Bab III-4
Tabel 3.3	Kebutuhan Dokumen Tata Ruang Kabupaten Mukomuko	Bab III-5
Tabel 3.4	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko.....	Bab III-7
Tabel 3.5	Faktor Penghambat dan pendorong Pelayanan Inspektorat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko.....	Bab III-10

Tabel 3.6	Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah beserta Faktor Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	Bab III-11
Tabel 4.1	Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dengan Cascading Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026.....	Bab IV-2
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah.....	Bab V-2
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026.....	Bab VI-2
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	Bab VII-2

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021.....	Bab II-6
Gambar 2.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil, Honor Daerah, Tenaga Kerja Sukarela Tahun 2021.....	Bab II-8
Gambar 2.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Status Kepegawaian dan Tingkat Golongan Tahun 2021.....	Bab II-9
Gambar 2.4	Data Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural Tahun 2021.....	Bab II-11

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, sehubungan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko disusun dengan berpedoman pada Kebijakan Nasional yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko sesuai dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko. Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan lima tahunan, di mana Rencana Strategis ini nantinya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko.

Proses penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026. Rencana Strategis disinkronkan dengan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (visi, misi dan program Bupati terpilih). Dalam penyusunannya melibatkan stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait pada



Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko. Penyempurnaan Rencana Strategis meliputi visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko ditetapkan oleh Peraturan Bupati Mukomuko. Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko disampaikan ke Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 juga menjadi acuan dalam penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal. Rencana Strategis diwajibkan menetapkan dan mencapai SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang ditetapkan Kementerian/Lembaga.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana ditegaskan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun provinsi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 3);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 13);

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Inspektorat Daerah lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Mukomuko yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko yang merupakan dokumen perencanaan komprehensif dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan.

Berdasarkan maksud tersebut, maka Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan:

- a. Agar Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko selama lima tahun dapat terukur dan terarah.
- b. Sebagai Pedoman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang bersumber dari dana APBD.
- c. Sebagai dasar pengukuran Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai perencanaan pembangunan.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

## **BAB I      PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

## **BAB II      GAMBARAN UMUM PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Inspektorat Daerah, Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko.

## **BAB III     PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi Bupati terpilih, telaahan RPJMD, telaahan RTRW serta penentuan isu-isu strategis.

## **BAB IV     TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH**

Bab ini menguraikan rumusan Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko, tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko.

## **BAB V      STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INSPEKTORAT DAERAH**

Bab ini berisikan Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam rangka mencapai Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko.

## **BAB VI     RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT DAERAH**

Bab ini berisikan indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko yang mengacu pada RPJMD.

## **BAB VII    KINERJA PENYELENGGARAAN INSPEKTORAT DAERAH**

Bab ini berisikan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif perangkat daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko.

## **BAB VIII   PENUTUP**

# **BAB II**

## **GAMBARAN UMUM PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH**

### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH**

Pembentukan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko, sedangkan rincian tugas pokoknya diatur dalam Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko.

#### **2.1.1. TUGAS INSPEKTORAT DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko yang disebutkan pada Pasal 3 ayat (1) bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

#### **2.1.2. FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dan fungsi, organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko berdasarkan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko yang terdapat pada BAB III yaitu sebagai berikut:

### **1. Tugas dan Fungsi Sekretariat**

Sekretariat Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
- c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

#### **1.1 Tugas dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan**

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerja sama pengawasan, dan dokumentasi.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;



- b. Pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
- d. Koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum.

### **1.2 Tugas dan Fungsi Sub Bagian Analisis dan Evaluasi**

Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. Penginventarisasian hasil pengawasan;
- b. Koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- c. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- d. Pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- f. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.

### **1.3 Tugas dan Fungsi Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan**

Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;

- f. Pelaksanaan perbendaharaan; dan
- g. Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

## **2. Tugas dan Fungsi Inspektorat Pembantu**

Inspektorat Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya Inspektorat Pembantu mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Lainnya;
- h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; dan
- j. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

## **3. Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu sesuai bidang tugasnya.

### **2.1.3. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH**

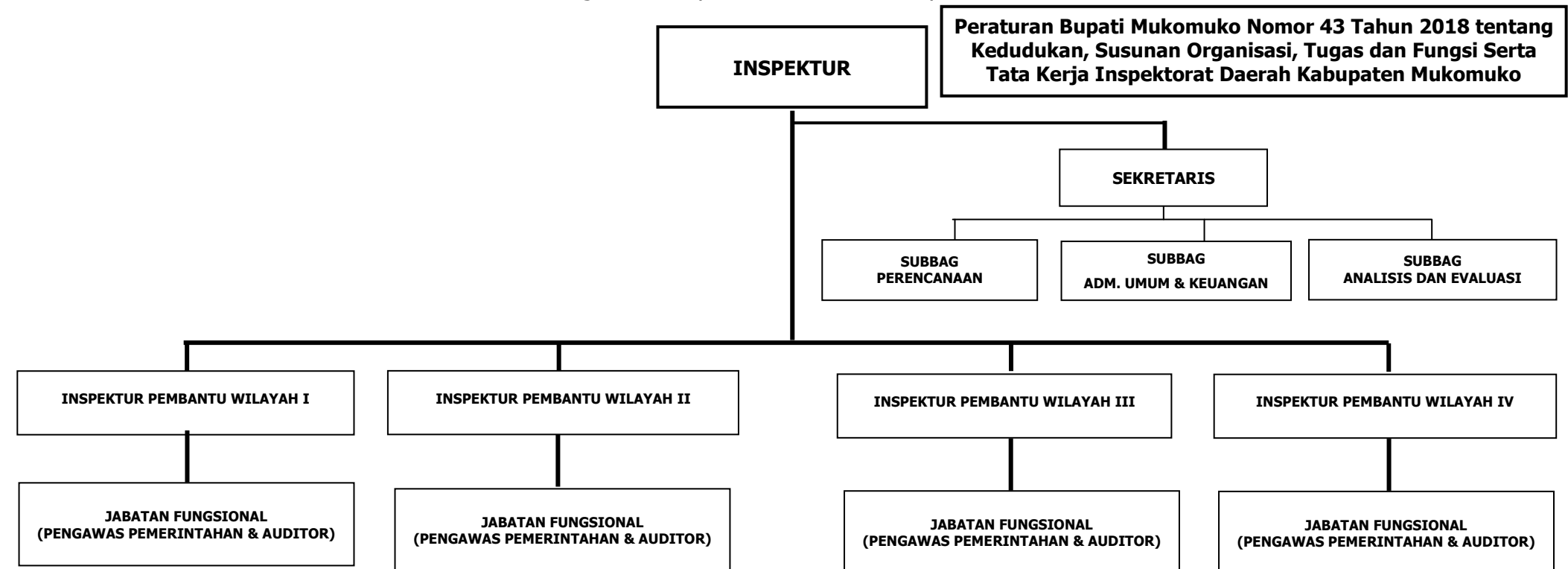
Berdasarkan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomukomaka struktur organisasi Inspektorat Daerah sejak ditetapkannya peraturan Bupati hingga saat penyusunan Rencana Strategis Perubahan 2016-2021 ini adalah sebagai berikut:

#### **INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

- ❖ **INSPEKTUR**
- ❖ **SEKRETARIS**
  - **SUB BAGIAN PERENCANAAN**
  - **SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI**
  - **SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN**
- ❖ **INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I**
  - **JABATAN FUNGSIONAL**
- ❖ **INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II**
  - **JABATAN FUNGSIONAL**
- ❖ **INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III**
  - **JABATAN FUNGSIONAL**
- ❖ **INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV**
  - **JABATAN FUNGSIONAL**

**Gambar 2.1**

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko



Sumber: Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Periode Januari 2021

## 2.2 SUMBER DAYA INSPEKTORAT DAERAH

### 2.2.1 Pegawai Inspektorat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko didukung dengan Pegawai yang berjumlah 50 orang, yang terdiri dari 42 orang Pegawai Negeri Sipil, 1 orang Honor Daerah dan 7 orang Tenaga Kerja Suka Relu (Data Tahun 2021).

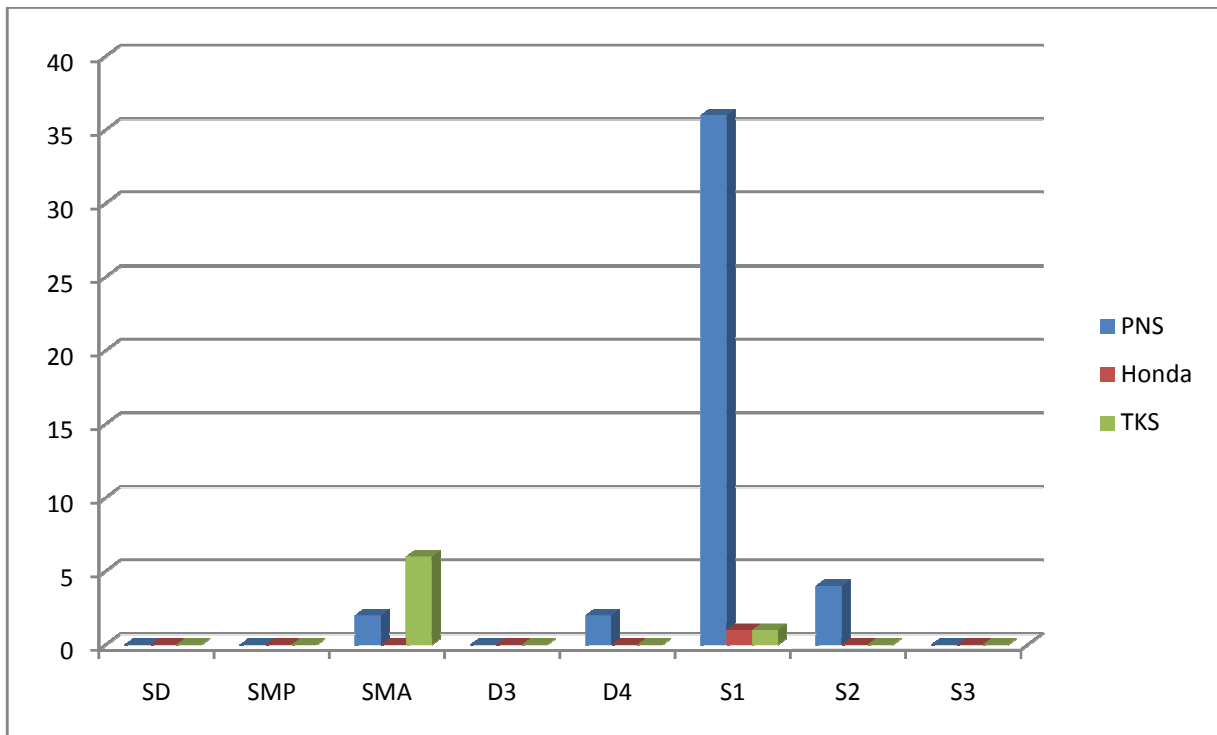
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil, Honor Daerah, Tenaga Kerja Sukarela Tahun 2021**

No	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah	%
		PNS	Honor Daerah	Tenaga Kerja Sukarela		
1	SD	-	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	-	-
3	SMA	2 orang	-	6 orang	8 orang	16
4	D3	-	-	-	-	-
5	D4	-	-	-	-	-
6	S1	36 orang	1 orang	1 orang	38 orang	76
7	S2	4 orang	-	-	4 orang	8
8	S3	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>42 orang</b>	<b>1 orang</b>	<b>8 orang</b>	<b>50 orang</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Bulan September 2021

**Gambar 2.2**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil, Honor Daerah, Tenaga Kerja Sukarela**  
**Tahun 2021**



Berdasarkan Tabel 2.1 dan Gambar 2.2 di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menentukan proses perencanaan dan mensinergikan program/kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut: SD sebanyak 0%, SMP sebanyak 0%, SMA sebanyak 16%, D3 sebanyak 0%, D4 sebanyak 0%, S1 sebanyak 76%, S2 sebanyak 8% serta S3 sebanyak 0%. Melihat komposisi Strata I merupakan tingkat pendidikan yang banyak ditempati oleh pegawai Inspektorat Daerah di Tahun 2021.

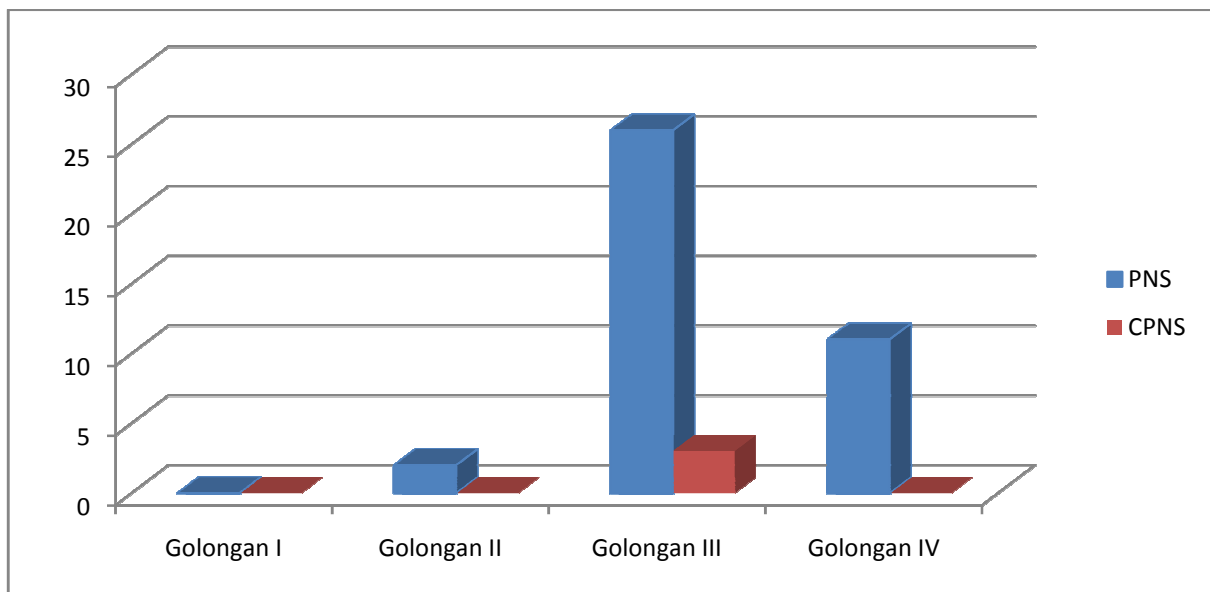
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko berdasarkan status kepegawaian dan tingkat golongan, dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Status Kepegawaian dan Tingkat Golongan Tahun 2021**

No	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah	%
		PNS	CPNS		
1	Golongan I	-	-	-	0
2	Golongan II	2 orang	-	2 orang	5
3	Golongan III	26 orang	3 orang	29 orang	69
4	Golongan IV	11 orang	-	11 orang	26
<b>Jumlah</b>		<b>39 orang</b>	<b>-</b>	<b>42 orang</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Bulan September 2021*

**Gambar 2.3**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Status Kepegawaian dan Tingkat Golongan Tahun 2021**



Berdasarkan Tabel 2.2 dan Gambar 2.3 di atas dapat dilihat bahwa pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko terdiri atas Golongan I sebanyak 0%, Golongan II sebanyak 5%, Golongan III sebanyak 69% dan Golongan IV 26%. Melihat komposisi tersebut pegawai Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah banyak ditempati oleh Golongan III.

Disamping pendidikan formal, pegawai Inspektorat Daerah juga telah mengikuti pendidikan Struktural, untuk data lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

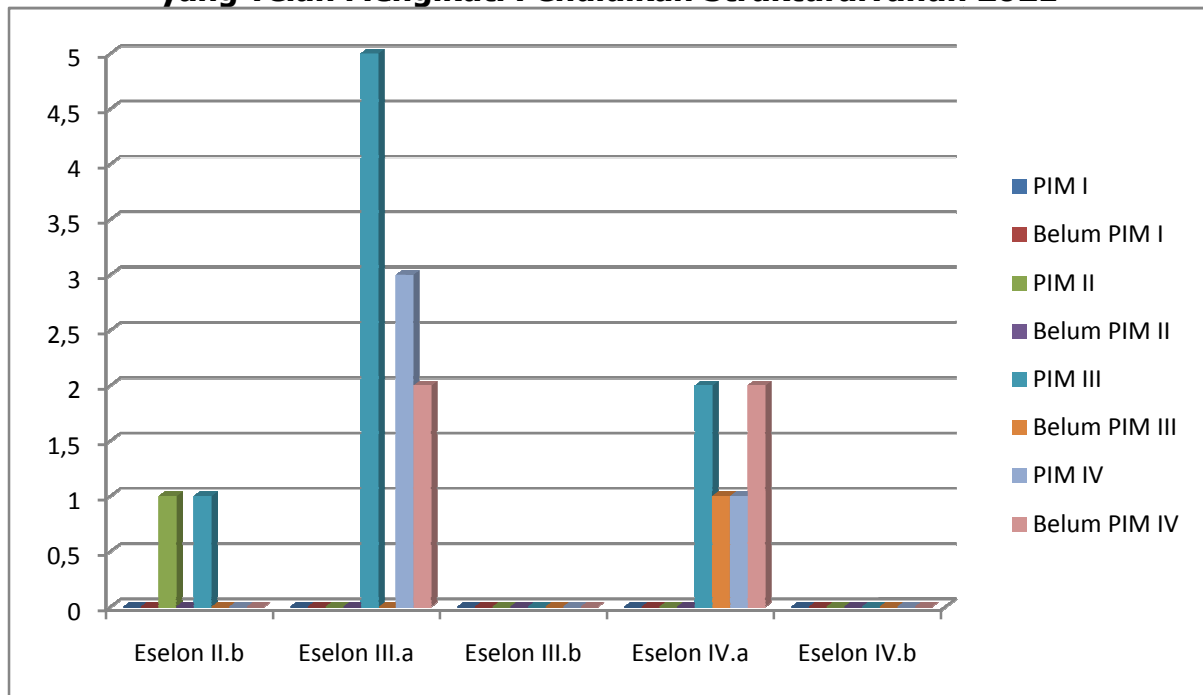
**Tabel 2.3**  
**Data Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural Tahun 2021**

No	Eselon	Pangkat	Gol/ Ruang	Jumlah Pegawai Struktural	PIM				Belum Ikut PIM
					I	II	III	IV	
1	I.a	Pembina Utama	IV.e	-	-	-	-	-	-
2	I.b	Pembina Utama Madya – Pembina Utama	IV.d- IV.e	-	-	-	-	-	-
3	II.a	Pembina Utama Muda – Pembina Utama Madya	IV.c- IV.d	-	-	-	-	-	-
4	II.b	Pembina TK I – Pembina Utama Muda	IV.b- IV.c	1	-	1	1	-	-
5	III.a	Pembina – Pembina TK I	IV.a- IV.b	5	-	-	5	3	2
6	III.b	Penata TK.I – Pembina	III.d- IV.a	-	-	-	-	-	-
7	IV.a	Penata – Penata TK.I	III.c- III.d	3	-	-	2	1	2
8	IV.b	Penata Muda TK.I – Penata	III.b- III.c	-	-	-	-	-	-
9	V.a	Penata Muda – Penata Muda TK I	III.a- III.b	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>				<b>9</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Sumber: Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Bulan Januari 2021



**Gambar 2.4**  
**Data Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural Tahun 2021**



Berdasarkan Tabel 2.3 dan Gambar 2.4 diatas dapat dilihat bahwa pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko untuk Eselon III.a2 Orang belum mengikuti Pim IV. Sedangkan untuk Eselon IV.a2 orang telah mengikuti Pim III.

### **2.2.2. ASET PEMERINTAH DAERAH**

Di samping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana/prasarana juga dibutuhkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tabel 2.4 dapat dilihat, Neraca Aset sarana/prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko pada tahun 2021.

**Tabel 2.4**  
**Neraca Aset**  
**Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021**

No	Nama Barang	Nilai Barang (Rp)
1.	Aset Tetap	3.330.399.970,00
2.	Peralatan dan Mesin	1.884.530.369,00
3.	Gedung dan Bangunan	1.445.869.601,00
4.	Aset Tetap Lainnya	0,00
5.	Aset Lainnya	32.891.000,00

*Sumber : Daftar Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko*

Sementara itu, data-data asetnya Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko dapat dilihat pada table 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5

## Data Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Per31 Agustus 2021

## KARTU INVENTARIS RUANGAN

KABUPATEN : MUKOMUKO  
 PROPINSI : BENGKULU  
 UNIT :  
 SATUAN KERJA : INSPEKTORAT  
 RUANGAN : INSPEKTUR  
 KODE LOKASI : 12.06.03.14.01.04.01.01

NO	NAMA BARANG BARANG	JENIS	MERK MODEL	NO SERI PABRIK	UKURAN	BAHAN	TAHUN PEMBUATAN PEMBELIAN	NO. KODE BARANG	JUMLAH BARANG / JASA	HARGA(RP) / BELI PEROLEHAN	KEADAAN BARANG			KETERANGAN
											BAIK (B)	KURANG BAIK (KB)	RUSAK BERAT	
1	FELLING KABIBET		YUNIKA			SENG	2007	02.03.01.02.03.0001	1 BUAH	700,000		KB		PEMDA
2	RAK BUKU		LOKAL			KAYU	2005		1 BUAH	900,000	BAIK			PEMDA
3	LEMARI ES		SHARP			KOMPLIKASI	2007	02.06.02.04.01.0004	1 UNIT	1,500,000	BAIK			KANTOR
4	MEJA BIRO		LOKAL			KAYU	2005	02.06.02.01.48.0006	1 BUAH	636,000	BAIK			PEMDA
5	KURSI PUTAR		SUBARU			BUSA / BESI	2007	02.06.02.01.30.0008	1 BUAH	1,200,000	BAIK			PEMDA
6	1 SET KURSI TAMU		LOKAL			KAYU /BUSA	2012	02.06.02.01.28.0003	1 SET	3,844,500	BAIK			PEMDA
7	PAPAN KEGIATAN					TRIPLEK	2004		1 BUAH		BAIK			KANTOR
8	TONG SAMPAH					PLASTIK	2010		1 BUAH		BAIK			KANTOR
9	TELEVISI		SUMO			KOMPLIKASI	2007	02.06.02.06.03.0001	1 UNIT	1,100,000		KB		KANTOR
10	JAM DINDING		STANDAR			KOMPLIKASI	2006	02.06.02.02.05.0005	1 BUAH	75,000		KB		KANTOR
11	KURSI PLASTIK		NAPOU			PLASTIK	2007	02.06.02.01.61.0020	1 BUAH	45,000	BAIK			KANTOR
12	KURSI PLASTIK		LG			PLASTIK	2007	02.06.02.01.61.0021	1 BUAH	45,000	BAIK			KANTOR
13	AC					KOMPLIKASI	2012	02.06.02.04.03.0001	1 BUAH	4,950,000	BAIK			PEMDA
14	GAMBAR BUPATI DAN WAKIL BUPATI						2017		1 BUAH		BAIK			KANTOR
15	FOTO INSPEKTUR LAMA						2016		1 BUAH		BAIK			KANTOR
16	FOTO INSPEKTUR BARU						2017		1 BUAH		BAIK			HIBAH
17							2017		1 BUAH		BAIK			HIBAH

INSPEKTUR,  
 INSPEKTORAT  
 DAERAH  
 A. Halim, SE., M.Si  
 Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP. 196809211994031006  
 NIP.196809211994031006

MUKOMUKO, SEPTEMBER 2021 PEMBANTU  
 PENGURUS BARANG

Yogi Saputra Dewata  
 YOGI SAPUTRA DEWATA, SE  
 NIP.199311202019031004

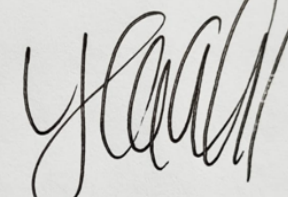
**KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)**

KABUPATEN : MUKOMUKO  
 PROPINSI : BENGKULU  
 UNIT :  
 SATUAN KERJA : INSPEKTORAT  
 RUANGAN : SEKRETARIS  
 KODE LOKASI : 12.06.03.14.01.04.01.01

NO	NAMA BARANG JENIS BARANG	MERK MODEL	NO SERI FABRIK	UKURAN	BAHAN	TAHUN PEMBUATAN PEMBELIAN	NO. KODE BARANG	JUMLAH BARANG / JASA	HARGA(RP) / BELI PEROLEHAN	KEADAAN BARANG			KETERANGAN
										BAIK (B)	KURANG BAIK (KB)	RUSAK BERAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	MEJA KERJA ESELON 3				KAYU/BESI	2019		1 BUAH		B			
2	KURSI PUTAR	ERGOSIT			BESI / BUSA	2019	02.06.02.01.027.0003	1 BUAH		B			
3	LEMARI BUKU				KAYU		02.06.02.01.01.0010	1BUAH			KB		
4	LEMARI ARSIP				KAYU		02.06.02.01.01.0001	1 BUAH		B			
5	KURSI BESI	PHOENIX			BUSE/BESI			1 BUAH		B			
6	KURSI BESI	FUTURA			BESI/BUSA	2019	02.06.02.01.030.0014	1 BUAH		B			
7	LEMARI ARSIP				KAYU	2019	02.06.03.04.008.0023	1 BUAH		B			
8	1 SET KURSI TAMU				BUSA / KAYU			1 SET		B			
9	AC	LIG			KOMPLIKASI			1 BUAH		B			

MUKOMUKO, SEPTEMBER 2021 : PEMBANTU  
 PENGURUS BARANG

  
**INSPEKTUR,**  
 INSPEKTORAT  
 DAERAH  
**A. Halim, SE., M.Si**  
 Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP. 196809211994031006

  
**YOGI SAPUTRA DEWATA, SE**  
 NIP. 199311202019031004

**KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)**

KABUPATEN : MUKOMUKO  
 PROPINSI : BENGKULU  
 UNIT :  
 SATUAN KERJA : INSPEKTORAT  
 RUANGAN : SEKRETARIAT  
 KODE LOKASI : 14.06.02.14.01.04.01.01

NO	NAMA BARANG JENIS BARANG	MERK MODEL	NO SERI PABRIK	UKURAN	BAHAN	TAHUN PEMBUATAN PEMBELIAN	NO. KODE BARANG	JUMLAH BARANG / JASA	HARGA(RP) / BELU PEROLEHAN	KEADAAN BARANG			KETERANGAN
										BAIK (B)	KURANG BAIK (KR)	Rusak RFRAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meja 1/2 Biro	Activ			Kayu			1		B			
2	Meja 1/2 Biro	Activ			Kayu			1			KB		
3	Meja 1/2 Biro				Kayu		02.06.02.01.48	1			KB		
4	Meja 1/2 Biro				Kayu		02.06.02.01.48.0014	1			KB		
5	Meja 1/2 Biro				Kayu			1			KB		
6	Meja 1/2 Biro				Kayu			1			KB		
7	Kursi Besi	Phoenix			Besi/Busa			1		B			
8	Kursi Besi	Phoenix			Besi/Busa			1		B			
9	Kursi besi	Phoenix			besi/busa			1		B			
10	Kursi Besi	Phoenix			Besi/Busa			1		B			
11	Kursi Plastik				Plastik			1			KB		
12	Kursi Putar	Artiv			Busa/Plastik			1		B			
13	Lemari Kayu			2 Pintu	Kayu		02.06.02.01.01.0007	1		B			
14	Lemari Kayu			4 Pintu	Kayu			1		B			
15	Lemari Kayu 4			4 Pintu	Kayu			1		B			
16	Printer	Epson L360			Campuran			1		B			
17	Printer	Epson L360			Campuran	2019	02.06.03.02.003.0008	1		B			
18	Printer	Epson L3150			Campuran	2019	02.06.02.01.027.0004	1		B			
19	Meja 1/2 Biro	Expo			Kayu			1			KB		
20	Meja 1/2 Biro	Activ			Kayu			1			KB		
21	Meja 1/2 Biro	Activ			Kayu			1			KB		
22	Meja 1/2 Biro	Activ			Kayu			1			KB		
23	Meja 1/2 biro				Kayu		02.06.02.01.48.0011	1			KB		
24	Meja 1/2 Biro				Kayu			1			KB		
25	Meja 1/2 Biro				Kayu			1			KB		
26	Meja Biro				Kayu/kaca		02.06.02.01.19	1			KB		
27	Meja Biro				Kayu/kaca		06.NM-APRO-07	1			KB		
28	Kursi Putar	Siwanu			Busa/Plastik			1			KR		
29	Kursi Putar	Activ			Busa/Plastik			1		B			
30	Kursi Putar	Activ			Busa/Plastik			1		B			
31	Kursi Putar				Busa/Plastik			1			KB		
32	Kursi Putar				Busa/Plastik			1			KB		
33	Kursi Besi	Putra			Besi/Busa	2019		1		B			Pengadaan 2019
34	Kursi Besi	Phoenix			Besi/Busa			1		B			

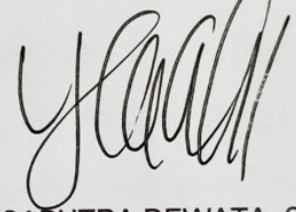
Activate Win



35	Kursi Besi	Phoenix		Besi/Busa		1		B		
36	Lemari Kayu		6 Pintu	Kayu		1		B		
37	Lemari Kayu		2 Pintu	Kayu		1		B		
38	Lemari Besi	yunika		Besi	02.06.01.04.04.0004	1		B		
39	Printer	Epson L360		Campuran		1		B		
40	Printer	Epson L360		Campuran		1		B		
41	Printer	Epson L360		Campuran		1		B		
42	Printer	Epson L3150		Campuran	2019	1	3.252.000	B		Pengadaan 2019
43	Printer	Canon		Campuran		1		B	KB	
30	PC	Azuz		Campuran		1		B		

MUKOMUKO, SEPTEMBER 2021 PEMBANTU PENGURUS  
BARANG

INSPEKTUR,  
INSPEKTORAT DAERAH  
A. Halim, SE., M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196809211994031006

  
YOGI SAPUTRA DEWATA, SE  
NIP. 199311202019031004

KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)

KABUPATEN : MUKOMUKO  
 PROPINSI : BENGKULU  
 UNII :  
 SATUAN KERJA : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
 RUANGAN : IRBAN I  
 KODE LOKASI : 12.06.05.14.01.04.01.01

NO	NAMA BARANG JENIS BARANG	MFRK MODFI	NO SERI PABRIK	IKHIRAN	BAHAN	TAMU PEMBELIAN	NO KODE BARANG	JUMLAH BARANG / JASA	HARGA(RP) / BELI PEROLEHAN	KEADAAN BARANG			KETERANGAN
										BAIK (B)	KURANG BAIK (KB)	RUSAK BERAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meja 1/2 Biro	Activ			Kayu			1		B			
2	Meja 1/2 Biro	Activ			Kayu			1		B			
3	Meja 1/2 Biro				Kayu		02.06.02.01.48.0012	1		B			
4	Meja 1/2 Biro				Kayu			1			KB		
5	Meja 1/2 Biro				Kayu			1			KB		
6	Meja biro	Activ			Kayu			1		B			
7	Meja Biro				Kayu			1		B			
8	Meja Biro				Kayu			1		B			
9	Kursi Besi	Futura			Besi/Busa	2019	02.06.02.01.027.0003	1		B			Pengadaan 2019
10	Kursi Besi	Futura			Besi/Busa	2019	02.06.02.01.027.0001	1		B			Pengadaan 2019
11	Kursi Besi	Futura			Besi/Busa	2019	02.06.03.02.002.0020	1		D			Pengadaan 2019
12	Kursi Besi	Phoenix			Besi/Busa			1		R			
13	Kursi Besi	Futura			Besi/Busa	2019		1		B			Pengadaan 2019
14	Kursi Putar	Ergosit			Busa/Plastik	2019	02.06.03.05.004.0001	1		B			Pengadaan 2019
15	Kursi Putar				Busa/Plastik		06.MM.APBD.06	1		D			
16	Lemari Kayu			4 Pintu	Kayu			1		B			
17	Lemari Besi				Besi/Busa		02.03.01.01.04.0001	1		B			
18	Kursi Kayu				Kayu			1		B			
19	Printer	Epson L500			Campuran			1		B			
20	Pc	ASUS			Campuran			1		R			

INSPEKTUR,  
 INSPEKTORAT DAERAH  
 MUKOMUKO  
 A. Halim, SE., M.Si  
 Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP. 196809211994031006

MUKOMUKO, SEPTEMBER 2021  
 PEMBANTU PENGURUS BARANG

Yogi Saputra Dewata  
 YOGI SAPUTRA DEWATA, SE  
 NIP. 199311202019031004

Activate V



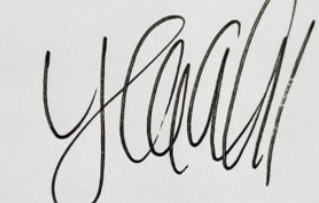
**KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)**

KABUPATEN : MUKOMUKO  
 PROPINSI : BENGKULU  
 UNIT :  
 SATUAN KERJA : INSPEKTORAT  
 RUANGAN : IRBAN II  
 KODE LOKASI : 12.06.05.14.01.04.01.01

NO	NAMA BARANG JENIS BARANG	MERK MODEL	NO SERI PADRIK	UKURAN	BAHAN	TAHUN PEMBUATAN PEMDALIAN	NO. KODE BARANG	JUMLAH BARANG / JASA	HARGA(RP) / BELU PEROLEHAN	KEADAAN BARANG			KETERANGAN
										BAIK (B)	KURANG BAIK (KB)	RUSAK BERAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meja 1/2 Biro	Activ			Kayu			1		B			
2	Meja 1/2 Biro	Activ			Kayu			1		B			
3	Meja 1/2 Biro	Activ			Kayu			1		B			
4	Meja 1/2 Biro				Kayu			1		B			
5	Meja Biro	Activ			Kayu			1		B			
6	Meja Biro	Activ			Kayu			1		B			
7	Meja Biro				Kayu			1		B			
8	Kursi Putar				Busa/Plastik			1			KB		
9	Kursi Putar	Ergosit			Busa/Plastik	2019	02.06.03.05.004.0001	1		B			Pengadaan 2019
10	Kursi Putar				Busa/Plastik			1		B			
11	Kursi Putar				Busa/Plastik			1		B			
12	Kursi Putar				Busa/Plastik			1		B			
13	Kursi Putar				Busa/Plastik			1		B			
14	Kursi Besi	Futura			Besi/Busa		02.06.02.01.030.0015	1		B			
15	Kursi Besi	Futura			Besi/Busa			1		B			
16	Kursi Besi	Phoenix			Besi/Busa			1		B			
17	Kursi Besi	Phoenix			Besi/Busa			1		B			
18	Lemari Kayu			4 Pintu	Kayu			1		B			
19	Lemari Besi				Besi			1		B			
20	Printer	Epson	L360		Campuran			1		B			

  
**INSPEKTUR,**  
 INSPEKTORAT  
 DAERAH  
**A. Halim, SE., M.Si**  
 Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP. 196809211994031006

MUKOMUKO, SEPTEMBER 2021 PEMBANTU  
 PENGURUS BARANG

  
**YOGI SAPUTRA DEWATA, SE**  
 NIP. 199311202019031004

**KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)**

KABUPATEN : MUKOMUKO  
 PROPINSI : BENGKULU  
 UNIT :  
 SATUAN KERJA : INSPEKTORAT  
 RUANGAN : IRBAN III  
 KODE LOKASI : 12.06.05.14.01.04.01.01

NO	NAMA BARANG JENIS BARANG	MERK MODEL	NO SERI PABRIK	UKURAN	BAHAN	TAHUN PEMBUATAN PEMBELIAN	NO. KODE BARANG	JUMLAH BARANG / JASA	HARGA(RP) / BELI PEROLEHAN	KEADAAN BARANG			KETERANGAN
										BAIK (B)	KURANG BAIK (KB)	RUSAK BERAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meja 1/2 Biro				Kayu		06.MM-APBD-07	1		B			
2	Meja 1/2 Biro				Kayu			1			KB		
3	Meja 1/2 Biro				Kayu			1		B			
4	Meja 1/2 Biro				Kayu			1		B			
5	Meja Biro				Kayu			1		B			
6	Meja Biro				Kayu			1		B			
7	Kursi Besi	Futura			Besi/Busa			1		B			
8	Kursi Besi	Futura			Besi/Busa			1		B			
9	Kursi Besi	Phoenix			Besi/Busa			1		B			
10	Kursi Besi	Phoenix			Besi/Busa			1		B			
11	Kursi Putar	Ergosit			Busa/Plastik	2019	02.06.02.01.001.0015	1		B			Pengadaan 2019
12	Kursi Putar				Busa/Plastik			1		B			
13	Kursi Putar				Busa/Plastik			1		B			
14	Lemari Kayu			4 Pintu	Kayu			1		B			
15	Printer	Epson	L360		Campuran			1		B			

INSPEKTUR,  
 INSPEKTORAT  
 DAERAH  
 A. Halim, SE., M.Si  
 Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP. 196809211994031006

MUKOMUKO, SEPTEMBER 2021      PEMBANTU  
 PENGURUS BARANG

*Yogi Saputra Dewata*  
 YOGI SAPUTRA DEWATA, SE  
 NIP. 199311202019031004

**KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)**

KABUPATEN : MUKOMUKO  
 PROPINSI : BENGKULU  
 UNIT :  
 SATUAN KERJA : INSPEKTORAT  
 RUANGAN : IBAN IV  
 KODE LOKASI : 12.06.05.14.01.04.01.01

NO	NAMA BARANG JENIS BARANG	MERK MODEL	NO SERI PABRIK	UKURAN	BAHAN	TAHUN PEMBUATAN PEMBELAN	NO. KODE BARANG	JUMLAH BARANG / JASA	HARGA (RP) / BELI PEFOLEHAN	KEADAHAN BARANG			KETERANGAN
										BAIK (B)	KURANG BAIK (KB)	RUSAK BERAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meja 1/2 Biro	Activ			Kayu			1		B			
2	Meja 1/2 Biro				Kayu			1		B			
3	Meja 1/2 Biro				Kayu			1		B			
4	Meja Biro				Kayu			1		B			
5	Meja Biro				Kayu			1		R			
6	Meja Biro				Kayu			1		B			
7	Kursi Putar	Ergosit			Busa/Plastik	2019	02.06.02.01.030.0015	1		B			Pengadaan 2019
8	Kursi Putar				Busa/Plastik			1		B			
9	Kursi Putar				Busa/Plastik			1		R			
10	Kursi Putar				Busa/Plastik			1		B			
11	Kursi Besi	Futura			Besi/busa	2019	02.06.02.01.028.0004	1		B			Pengadaan 2019
12	Kursi Besi	Futura			Besi/busa	2019	02.06.02.01.030.0017	1		B			Pengadaan 2019
13	Kursi Besi	Futura			Besi/busa	2019	02.06.02.01.001.0013	1		B			Pengadaan 2019
14	Kursi Besi	Futura			Besi/busa	2019	02.06.04.01.004.0001	1		B			Pengadaan 2019
15	Kursi Besi	Phoenix			Besi/busa			1		B			
16	Kursi Besi	Phoenix			Besi/busa			1		B			
17	Lemari Kayu				Kayu			1		B			
18	Lemari Kayu				Kayu			1		B			
19	Printer	Epson	13150		Campuran	2019	02.06.02.01.030.0013	1		R			Pengadaan 2019

INSPEKTUR,  
 INSPEKTORAT DAERAH  
 A. Halim, SE., M.Si  
 Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP. 196809211994031006

MUKOMUKO, SEPTEMBER 2021 PFMIRANTI  
 PENGURUS BARANG

*Yogi Saputra Dewata*  
 YOGI SAPUTRA DEWATA, SE  
 NIP. 199311202019031004

Sumber: Data KIR Inspektorat Daerah Kab. Mukomuko Per Agustus 2021

Berdasarkan data tabel 2.5 di atas dapat dijelaskan bahwa aset daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko cukup banyak, akan tetapi masih perlu penambahan aset untuk dapat meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko. Hal ini dikarenakan belum seimbangnya antara jumlah aset dengan jumlah pegawai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko. Adapun aset yang masih perlu penambahan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko diantaranya: ruang pertemuan, ruang arsip, mobil operasional, sepeda motor, laptop/komputer, peralatan zoom meeting, aplikasi, televisi, printer, scanner, proyektor, Global Positioning System (GPS), lemari, meja, kursi, AC, alat penghancur kertas, penambahan kualitas jaringan internet, lampu taman, tempat parkir kendaraan dinas, chain saw (alat pemotong), kamera dan drone.

### **2.3 KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH**

Kinerja merupakan prestasi kerja atau hasil kerja yang telah dicapai selama periode yang ditentukan. Kinerja berkontribusi bagi kemajuan pelayanan pada instansi yang bersangkutan untuk tahun-tahun berikutnya. Adapun kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko pada 5 tahun sebelumnya 2016 s/d 2020 dapat dilihat pada tabel 2.6 dan 2.7 berikut ini:

Berdasarkan Data Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 diatas, dapat dilihat bahwa Pencapaian Kinerja Kegiatan dan Program Inspektorat Daerah terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis 2021 sd 2026 adalah sebagai berikut: pada tahun 2016 capaian rencana strategis berkisar 95%, di tahun 2017 capaian rencana strategis berkisar 95%. Sementara itu, pada tahun 2018 capaian rencana strategis berkisar 91% dan tahun 2019 capaian rencana strategis berkisar 83%, serta pada tahun 2020 capaian rencana strategis berkisar 98%.

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH**

Tantangan Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah, terdapat pada upaya peningkatan:

- a. Penatausahaan Data berbasis elektronik dan terpadu;
- b. Ketepatan waktu dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- c. Konsistensi program dan kegiatan yang direncanakan untuk jangka waktu satu tahun kedepan ataupun jangka waktu lima tahun dengan regulasi dan kebutuhan masyarakat;
- d. Keakuratan data hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan.
- e. Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur;
- f. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kantor;
- g. Penggunaan Teknologi Informasi/ Sistem Informasi untuk proses perencanaan penganggaran, pengendalian, monitoring dan evaluasi;

Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah untuk melaksanakan perencanaan pembangunan sesuai dengan Visi, Misi Kepala Daerah dan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan provinsi Bengkulu dan Nasional;
- b. Peningkatan kualitas SDM Aparatur, melalui pelatihan teknis dan substantif;
- c. Peningkatan pola kerja, hubungan kerja dan koordinasi
- d. Peningkatan sarana dan prasarana
- e. Implementasi sistem informasi manajemen hasil pengawasan.

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah**  
**Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2020**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Inspektorat Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian PadaTahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Jumlah Penyediaan jasa surat menyurat			12 Bulan	12	1068	500	500	500	12	1068	500	500	500	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Jangka waktu Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik			12 Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			15 item	-	15	3	3	3	-	15	3	3	3	0%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			12 Bulan	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100,00%	0%	0%	0%	0%
5	Jumlah penerima jasa administrasi keuangan			13 orang	12	13	10	14	14	12	13	10	14	14	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	Jumlah penerima jasa kebersihan kantor			3 orang	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	Jumlah penyediaan alat tulis kantor			10 item	12	10	10	10	10	12	10	10	10	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8	Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan			3 item	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			5 item	12	5	5	5	5	8	5	5	5	5	66,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan			4 item	144	4	4	3	3	144	4	4	3	2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	66,67%
11	Jumlah penyediaan makanan dan minuman			7 item	12	7	6	6	6	12	7	6	6	6	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
12	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			39 ok	45	39	42	42	42	45	54	42	42	42	100,00%	138,46%	100,00%	100,00%	100,00%

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Inspektorat Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
13	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah			155 ok	111	155	40	172	172	111	155	40	172	172	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
14	Jumlah penerima jasa kantor			7 orang	-	7	5	4	4	-	5	5	4	4	0%	71,43%	100,00%	100,00%	100,00%
15	Jumlah pelaksanaan justifikasi serah terima belanja modal seluruh SKPD ke Bupati Mukomuko			1 kali	1	-	2	-	-	1	-	2	-	-	23%	0%	100,00%	0%	0%
16	Terlaksananya Pembangunan Gedung/Ruang Auditor dan Ruang Pemeriksaan			1 unit	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	92%	0%	0%	0%	0%
17	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			4 item	-	4	3	3	3	-	4	3	3	3	0%	100%	100%	100%	100,00%
18	Jumlah meubeler			3 item	30	3	-	3	3	26	3	-	3	2	87%	100%	0%	100%	66,67%
19	Realisasi Pengadaan Peralatan penunjang kinerja Aparatur Pengawasan			7 unit	7	-	-	-	-	6	-	-	-	-	85%	0%	0%	0%	0%
20	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			1 Unit	-	1	-	1	1	-	1	-	1	1	0%	100%	0%	100%	100,00%
21	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional			2 item	12	2	2	2	2	12	2	2	2	2	0%	100%	100%	100%	100,00%
22	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor			5 item	12	5	3	4	4	12	5	3	4	4	100%	100%	100%	100%	100%
23	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD yang diReview			5 Dokumen	-	-	5	5	5	-	-	5	5	5	0%	0%	100%	100%	100%
24	Jumlah Dokumen Penyerapan Anggaran dan Review Tender Pra DIPA			1 Dokumen	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	0%	0%	100%	0%	100%

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Inspektorat Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
25	Jumlah RKA SKPD yang di Review			40 SKPD	43	40	-	-	-	16	40	-	-	-	37%	100%	0%	0%	0%
26	Jumlah dokumen Pengadaan Barang & Jasa dan dana Desa			1 Dokumen	-	1	-	5	-	-	1	-	5	-	0%	100%	0%	100%	0%
27	Jumlah Pelaksanaan pengawasan inter secara berkala			7 kali	7	7	320	7	7	6	7	320	7	7	86%	100%	100%	100%	100%
28	Jumlah Kasus yang terselesaikan			20 kasus	-	20	20	10	10	-	20	20	9	9	0%	100%	100%	90%	90%
29	Jumlah PD yang Konsultasi			20 PD	-	-	20	20	20	-	-	-	20	20	0%	0%	0%	100%	100%
30	Level APIP			Level 3	-	-	1	3	3	-	-	1	3	3	0%	0%	100%	100%	100%
31	Jumlah Dokumen Koordinasi TP4D			1 Dokumen	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	0%	0%	100%	100%	100%
32	Jumlah Dokumen Inventarisasi Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan			3 dokumen	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	68%	100%	100%	100%	100%
33	Jumlah Penanganan pengaduan melalui Whistleblowing System dalam PBJ			5 pengaduan	-	-	5	5	5	-	-	5	5	5	0%	0%	100%	100%	100%
34	Jumlah Dokumen Evaluasi PMPRB Kab.Mukomuko			1 Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	96%	100%	100%	100%	100%
35	Jumlah Dokumen Evaluasi SPI PD			1 Dokumen	10	-	1	1	1	-	-	1	1	1	0%	0%	100%	100%	100%
36	Jumlah Penyelenggaraan Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko yang Terdata Harta Kekayaannya			25 ASN	-	-	25	20	20	-	-	25	20	20	0%	0%	100%	100%	100%



No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Inspektorat Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
37	Jumlah PNS/ASN yang terdata Harta Kekayaannya			600 PNS	306	600	200	200	200	288	600	200	200	200	94%	100%	100%	100%	100%
38	jumlah pengiriman PNS tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan			5 kali	5	5	4	5	5	4	9	4	5	5	80%	180%	100%	100%	100%
39	Jumlah Pengiriman ASN			9 orang	-	-	9	-	-	-	-	9	-	-	0%	0%	100%	0%	0%
40	Jumlah dokumen PAK Auditor			12 dokumen	-	12	2	12	12	-	12	2	12	12	0%	100%	100%	100%	100%
41	Jumlah pelaksanaan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja			1 kali	-	1	5	5	5	-	1	5	5	5	0%	100%	100%	100%	100%
42	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi yang Lebih Komprehensif			1 kali	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	97%	0%	100%	100%	100%
43	Jumlah Dokumen Catatan hasil Reviu DAK Fisik			15 dokumen	-	-	-	-	15	-	-	-	-	15	0%	0%	0%	0%	100%
44	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi			1 laporan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	0%	0%	0%	0%	100%
45	Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan			1 Dokumen	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	0%	0%	100%	100%	100%
46	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar			4 dokumen	-	-	1	4	4	-	-	1	4	4	0%	0%	100%	100%	100%
47	Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanganan Gratifikasi			3 Dokumen	-	-	3	3	3	-	-	3	3	3	0%	0%	100%	100%	100%
48	Jumlah Laporan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah			16 laporan	16		3	10	10	16	-	3	7	7	100%	0%	100%	70%	70%
49	jumlah dokumen perencanaan Renstra, Renja, Laki, Laporan Tahunan dan IKM			3 Dokumen	6	3	2	2	2	6	3	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Inspektorat Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian PadaTahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
50	Jumlah Dokumen Naskah Akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			1 Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34%	100%	100%	100%	100%
51	Jumlah dokumen review LAKIPDA			1 dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
52	Penyusunan laporan kinerja & perjanjian Kinerja			2 dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
53	Jumlah Dokumen Evaluasi LAKIP SKPD			42 dokumen	26	42	39	39	39	26	42	39	39	39	100%	100%	100%	100%	100%
54	Jumlah Dokumen Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			1 dokumen	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi Rencana Strategis Inspektorat Daerah Per Tahun															95%	95%	91%	83%	98%
Realisasi Rencana Strategis Inspektorat Daerah 2016 Sampai Dengan 2020															92%				

**Tabel 2.7**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah**  
**Kabupaten Mukomuko tahun 2016 - 2020**

No.	Uraian Kegiatan INSPEKTORAT	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Jumlah Penyediaan jasa surat menyurat	2.100.000	5.754.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.100.000	4.554.000	2.250.000	2.247.000	2.247.000	100,00%	79,14%	100,00%	99,87%	99,87%	14.604.000	13.398.000
2	Jangka waktu Pembiayaan untuk penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	26.400.000	39.042.154	45.000.000	50.000.000	50.000.000	21.934.458	23.234.029	32.864.624	40.066.100	40.066.100	83,09%	59,51%	73,03%	80,13%	80,13%	210.442.154	158.165.311
3	Jumlah penerima jasa administrasi keuangan	60.000.000	75.000.000	81.000.000	86.700.000	86.700.000	60.000.000	74.662.500	81.000.000	86.700.000	86.700.000	100,00%	99,55%	100,00%	100,00%	100,00%	389.400.000	389.062.500
4	Jumlah penerima jasa kebersihan kantor	25.200.000	25.200.000	25.200.000	27.000.000	27.000.000	25.200.000	25200000	25200000	27.000.000	27.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	129.600.000	129.600.000
5	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	13.282.500	0	0	0	0	12.530.000	0	0	0	0	94,33%	0%	0%	0%	0%	13.282.500	12.530.000
6	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	40.365.429	40.408.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.365.000	40.408.000	40000000	39.997.000	39.997.000	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	99,99%	200.773.429	200.767.000
7	Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan	46.617.225	46.617.200	46.000.000	46.000.000	46.000.000	46.613.600	46.617.200	46.000.000	46.000.000	46.000.000	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	231.234.425	231.230.800
8	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.600.000	7.062.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	4.600.000	7.058.000	6.987.000	7.000.000	7.000.000	69,70%	99,94%	99,81%	100,00%	100,00%	34.662.000	32.645.000
9	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.200.000	6.840.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	44.360.000	6.825.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	84,98%	99,78%	100,00%	100,00%	100,00%	83.040.000	75.185.000
10	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	21.504.000	22.577.000	19.500.000	19.000.000	19.000.000	21.174.000	17.700.000	18.150.000	17.820.000	17.820.000	98,47%	78,40%	93,08%	93,79%	93,79%	101.581.000	92.664.000
11	Jumlah penyediaan makanan minuman	17.250.000	34.164.500	35.000.000	35.000.000	35.000.000	17.239.000	34.144.500	35.000.000	34.990.000	34.990.000	99,94%	99,94%	100,00%	99,97%	99,97%	156.414.500	156.363.500
12	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	209.200.000	200.000.000	230.000.000	222.000.000	222.000.000	207.375.000	199.940.750	228.631.088	221.999.731	221.999.731	99,13%	99,97%	99,40%	100,00%	100,00%	1.083.200.000	1.079.946.300

No.	Uraian Kegiatan INSPEKTORAT	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
13	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	40.000.000	71.650.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	71.625.000	21.654.800	40.000.000	40.000.000	100,00%	99,97%	54,14%	100,00%	100,00%	231.650.000	213.279.800
14	Jumlah penerima jasa kantor	0	33.600.000	24.900.000	69.600.000	69.600.000	0	27.300.000	24.900.000	69.600.000	69.600.000	0%	81,25%	100,00%	100,00%	100,00%	197.700.000	191.400.000
15	Terlaksananya Pembangunan Gedung/Ruang Auditor dan Ruang Pemeriksaan	461.910.000	0	0	0	0	426.714.601	0	0	0	0	92,38%	0%	0%	0%	0%	461.910.000	426.714.601
16	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0	56.900.000	90.000.000	80.000.000	80.000.000	0	56.831.500	77.809.307	78.670.500	78.670.500	0%	99,88%	86,45%	98,34%	98,34%	306.900.000	291.981.807
17	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	37.500.000	0	40.000.000	40.000.000	0	34.525.000	0	40.000.000	40.000.000	0%	92,07%	0%	100,00%	100,00%	117.500.000	114.525.000
18	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional	74.900.000	98.645.000	78.000.000	64.545.000	64.545.000	73.825.500	97.545.600	76.486.000	64.518.000	64.518.000	98,57%	98,89%	98,06%	99,96%	99,96%	380.635.000	376.893.100
19	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	3.426.000	15.597.300	3.000.000	8.000.000	8.000.000	3.426.000	12.040.000	2.955.000	8.000.000	8.000.000	100,00%	77,19%	98,50%	100,00%	100,00%	38.023.300	34.421.000
20	Jumlah Meubelair	47.800.000	49.200.000	0	104.500.000	104.500.000	41.110.000	47.925.000	0	91.950.000	91.950.000	86,00%	97,41%	0%	87,99%	87,99%	306.000.000	272.935.000
21	Jumlah Lahan Parkir	0	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0%	0%	100,00%	0%	0%	50.000.000	50.000.000
22	Jumlah Pengiriman ASN	0	0	60.000.000	0	0	0	0	59.284.300	0	0	0%	0%	98,81%	0%	0%	60.000.000	59.284.300
23	Penyusunan laporan kinerja & perjanjian Kinerja	20.000.000	20.000.000	10.000.000	14.900.000	14.900.000	19.000.000	20.000.000	10.000.000	14.900.000	14.900.000	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	79.800.000	78.800.000
24	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD yang di Review	0	0	80.000.000	70.659.000	70.659.000	0	0	78.530.000	62.059.000	62.059.000	0%	0%	98,16%	87,83%	87,83%	221.318.000	202.648.000
25	Jumlah RKA SKPD yang di Review	155.323.750	80.000.000	0	0	0	57.220.000	79.970.000	0	0	0	36,84%	99,96%	0%	0%	0%	235.323.750	137.190.000
26	Jumlah dokumen Reviu Penyerapan Anggaran dan Reviu tender Pra DPA	0	0	50.000.000	0	86.615.000	0	0	50.000.000	0	86.375.000	0%	0%	100,00%	0%	99,72%	136.615.000	136.375.000

No.	Uraian Kegiatan INSPEKTORAT	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
27	Jumlah dokumen review LAKIPDA	44.844.507	46.000.000	46.000.000	30.329.000	30.329.000	44.800.000	46.000.000	43.000.000	30.329.000	30.329.000	99,90%	100,00%	93,48%	100,00%	100,00%	197.502.507	194.458.000
28	Jumlah Dokumen Evaluasi LAKIP OPD	96.592.500	106.251.750	100.000.000	80.000.000	80.000.000	94.634.000	97.942.950	99.997.300	79.967.142	79.967.142	97,97%	92,18%	100,00%	99,96%	99,96%	462.844.250	452.508.534
29	Jumlah Dokumen Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	62.265.000	67.246.200	67.000.000	33.325.000	33.235.000	61.015.000	65.446.200	66.720.000	33.325.000	33.235.000	97,99%	97,32%	99,58%	100,00%	100,00%	263.071.200	259.741.200
30	Jumlah Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	533.000.000	765.551.000	1.270.000.000	1.070.000.000	1.070.000.000	467.175.000	673.490.000	1.157.447.700	1.069.365.39	1.069.365.391	87,65%	87,97%	91,14%	99,94%	99,94%	4.708.551.000	4.436.843.482
31	Jumlah Kasus yang terselesaikan	92.931.563	97.578.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	92.350.000	97.575.000	82.525.000	80.075.000	80.075.000	99,37%	100,00%	91,69%	88,97%	88,97%	460.509.563	432.600.000
32	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi yang lebih Komprehensif	52.893.750	0	45.000.000	40.000.000	40.000.000	51.318.100	0	45.000.000	39.983.992	39.983.992	97,02%	0%	100,00%	99,96%	99,96%	177.893.750	176.286.084
33	Jumlah Pelaksanaan Justifikasi serah terima belanja modal seluruh OPD ke Bupati Mukomuko	75.000.000	0	0	0	0	17.350.000	0	0	0	0	23,13%	0%	0%	0%	0%	75.000.000	17.350.000
34	Jumlah Dokumen Evaluasi PMPRB Kab.Mukomuko	172.350.000	170.000.000	100.000.000	80.000.000	80.000.000	165.045.000	170.000.000	95.636.278	79.868.500	79.868.500	95,76%	100,00%	95,64%	99,84%	99,84%	602.350.000	590.418.278
35	Jumlah Penyelenggara Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko yang terdata Harta Kekayaannya	0	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	0	59.080.000	60.000.000	60.000.000	0%	0%	98,47%	100,00%	100,00%	180.000.000	179.080.000
36	Jumlah Dokumen Catatan hasil Revisi DAK Fisik	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0%	0%	0%	0%	100,00%	25.000.000	25.000.000
37	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	19.150.000	0%	0%	0%	0%	95,75%	20.000.000	19.150.000
38	Jumlah dokumen evaluasi SPI OPD	49.450.000	0	70.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	62.125.000	49.887.276	49.887.276	0%	0%	88,75%	99,77%	99,77%	219.450.000	161.899.552
39	jumlah dokumen Inventarisasi temuan dan Tindak Lanjut hasil Pengawasan	137.500.000	156.000.000	130.000.000	180.650.000	180.650.000	93.515.000	153.728.000	123.499.900	180.292.500	180.292.500	68,01%	98,54%	95,00%	99,80%	99,80%	784.800.000	731.327.900
40	Jumlah Penanganan pengaduan melalui Whistleblowing System dalam PBJ	0	0	25.000.000	36.615.000	36.615.000	0	0	25.000.000	36.615.000	36.615.000	0%	0%	100,00%	99,73%	99,73%	98.230.000	98.030.000

No.	Uraian Kegiatan INSPEKTORAT	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
41	Jumlah PNS/ASN yang terdata Harta Kekayaannya	150.000.000	50.000.000	50.000.000	57.000.000	57.000.000	140.956.600	50.000.000	50.000.000	56.992.950	56.992.950	93,97%	100,00%	100,00%	99,99%	99,99%	364.000.000	354.942.500
42	Jumlah OPD yang Konsultasi	0	0	30.000.000	19.815.000	19.815.000	0	0	0	19.815.000	19.815.000	0%	0%	0,00%	100,00%	100,00%	69.630.000	39.630.000
43	Jumlah Dokumen Koordinasi TP4D	0	0	80.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	44.300.000	199.577.000	199.577.000	0%	0%	55,38%	99,79%	99,79%	480.000.000	443.454.000
44	Jumlah Dokumen Level APIP	0	0	30.000.000	68.000.000	68.000.000	0	0	29.450.000	67.570.000	67.570.000	0%	0%	98,17%	99,37%	99,37%	166.000.000	164.590.000
45	jumlah pengiriman PNS tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	123.050.000	150.000.000	180.000.000	158.796.000	158.796.000	110.510.000	150.000.000	179.820.300	158.795.127	158.795.127	89,81%	100,00%	99,90%	100,00%	100,00%	770.642.000	757.920.554
46	Jumlah pelaksanaan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	0	60.000.000	20.000.000	18.295.000	18.295.000	0	59.997.000	7.300.000	18.295.000	18.295.000	0%	100,00%	36,50%	100,00%	100,00%	116.590.000	103.887.000
47	Jumlah dokumen PAK Auditor	0	41.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	41.000.000	14.631.000	15.000.000	15.000.000	0%	100,00%	97,54%	100,00%	100,00%	86.000.000	85.631.000
48	Jumlah Dokumen Naskah Akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	11.051.250	13.261.500	13.000.000	14.900.000	14.900.000	3.805.000	13.261.500	12.850.000	14.900.000	14.900.000	34,43%	100,00%	98,85%	100,00%	100,00%	67.112.750	59.716.500
49	Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan	0	0	20.000.000	14.900.000	14.900.000	0	0	20.000.000	14.900.000	14.900.000	0%	0%	100,00%	100,00%	100,00%	49.800.000	49.800.000
50	Jumlah dokumen Pengadaan Barang & Jasa dan dana Desa	0	82.200.000	0	86.615.000	0	0	80.640.000	0	86.375.000	0	0%	98,10%	0%	99,72%	0%	168.815.000	167.015.000
51	Jumlah Laporan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	0	0	40.000.000	36.000.000	36.000.000	0	0	16.990.000	23.515.000	23.515.000	0%	0%	42,48%	65,32%	65,32%	112.000.000	64.020.000
52	Jumlah Laporan Sapu Bersih Pungutan Liar	0	0	134.000.000	400.000.000	100.000.000	0	0	106.150.000	395.496.000	98.500.000	0%	0%	79,22%	98,87%	98,50%	634.000.000	600.146.000
53	Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanganan Gratifikasi	0	0	40.000.000	36.000.000	36.000.000	0	0	33.890.600	34.308.447	34.308.447	0%	0%	84,73%	95,30%	95,30%	112.000.000	102.507.494

No.	Uraian Kegiatan INSPEKTORAT	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
54	Jumlah Dokumenn Renstra, Renja, Renja Perubahan	35.000.000	25.000.000	10.000.000	12.000.000	12.000.000	35.000.000	25.000.000	10.000.000	12.000.000	12.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	94.000.000	94.000.000
JUMLAH		2.960.007.474	2.795.845.604	3.689.850.000	3.923.394.000	3.668.304.000	2.542.260.859	2.652.186.729	3.361.115.197	3.858.665.656	3.605.729.656	86%	95%	91%	98%	98%	17.037.401.078	16.019.958.097

# BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mukomuko Nomor 43 Tahun 2018 mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Keberadaan Inspektorat Daerah sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan, pendampingan dan pencegahan dini terhadap upaya penyimpangan atas ketentuan yang berlaku, baik dalam peñatausahaan Keuangan, Aparatur, Aset dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu Inspektorat Daerah juga berkewajiban mewujudkan Pemerintahan yang bersih, berwibawa, serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sebagai upaya mewujudkan tujuan tersebut diatas Inspektorat Daerah harus melakukan peningkatan kualitas baik individu maupun lembaga, untuk dapat melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut. Selain itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan berdasarkan tugas dan fungsi, agar pengawasan dan pembinaan yang dijalankan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan diatas maka, permasalahan dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko berdasarkan tugas dan fungsinya dapat dirumuskan sebagai berikut.

#### 3.1.1. Permasalahan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Permasalahan yang terkait dengan Pengawasan antara lain kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia aparatur perencana pada Inspektorat Daerah. Adapun Data Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Per Sub Bidang/Bidang yang ada, dapat dilihat pada Tabel 3.1 bawah ini:



**Tabel 3.1**  
**Data Analisis Jabatan**  
**Inspektorat**

No.	NAMA JABATAN	NAMA PEMANGKU JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	HASIL ABK	KELEBIHAN /KEKURANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Inspektur	A. HALIM	1	1	0
2	Sekretaris	Apriansyah, ST	1	1	0
3	Irban I	Damri, S.pd	1	1	0
4	Irban II	Siswanto, S.Pd	1	1	0
5	Irban III	Eko Setiawati, S.AP	1	1	0
6	Irban IV	Sardi, SPd	1	1	0
7	<b>Kepala Sub Bagian Umum &amp; Keuangan</b>	Eri Yadi	1	1	0
8	Analisis Informasi Pengembangan SDM Aparatur	Verawati,	1	1	0
9	Pengadministrasian Umum	-	1	1	0
10	Pengadministrasi Persuratan	-	0	1	-1
11	Pengelola Kepegawaian	-	1	1	0
12	Pengelola Keuangan	Nia Octaveni	1	1	0
13	Pengadministrasi Keuangan	L. Jurhanie Isfan Pratama, SE	0	1	-1
14	Bendahara	Gesrafil	1	1	0
15	Pengelola Gaji	-	1	1	0
16	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	-	0	1	-1
17	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	-	0	1	-1
18	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor	-	0	1	-1
19	Pengemudi	Wahyu Al Akbar	1	1	0
20	Pramu Taman	-	0	1	-1
21	Pramu Kebersihan	Nova Haryani	3	3	0
		Nopi Yarni			
		Agus Eliawati			
22	Pramu Bakti	-	0	1	-1
23	Petugas Keamanan	Deni Sumarto	2	2	0
		Decky Purnamawansyah			
24	<b>Kepala Sub Bagian Perencanaan</b>	<b>-</b>	1	1	0
25	Analisis Perencanaan Anggaran	Marjulita, SE	1	2	-1
26	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	-	0	2	-2

27	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	-	0	2	-2
28	Penyusunan Rencana Pengawasan	-	0	2	-2
29	Analisis Manajemen Resiko	-	1	2	-1
30	<b>Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi</b>	Andi Medisa, SH	1	1	0
31	Analisis Laporan Hasil Pemeriksaan	Ari Oktarinda, SE	1	2	-1
32	Analisis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	-	0	2	-2
33	Penelaah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kerugian Negara	-	0	2	-2
34	Penyusunan Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan	-	0	2	-2
35	Analisis Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan	-	0	2	-2
36	<b>JF Auditor Pertama</b>	Neneng Aswita, S.AP	11	30	-19
		Eka Purnama Syari, SH			
		Marlena Hartati, SE			
		Willy Waroca, ST			
		Ona vebta Restu, SH			
		Rena Elvira, S.Psi			
		Ditta Ikka Agustin, ST			
		Masrita, SE			
		Meri Arianti, S.AP			
		Yogi Saputra Dewata, S.E			
		Satria Andeski, Se			
37	<b>JF Auditor Muda</b>	Syafril, S.Kom.,MM	4	8	-4
		M. Abduh, SE.,MM			
		Akira, S.Kom.,MM			
		Emelya Novianti, SP			
38	<b>JF Auditor Madya</b>	-	0	6	-6
39	<b>JF Auditor Utama</b>	-	0	4	-4
40	<b>JF P2UPD Pertama</b>	Azhen Tobi, SE	3	30	-27
		Farda Wasni, SH			
		Desi Trisnawati			
41	<b>JF P2UPD Muda</b>	Misto, SKM	7	8	-1
		M. Yuaksen, S.AP			
		Sarmi Derita, SKM			
		Eska Hakim, SH			
		Nurhuda Suryani, S.Ag,			
		Edi Kusnanto, S.AP			
		Dwi Susiyanti, SE			
42	<b>JF P2UPD Madya</b>	Apriansyah, ST	3	6	-2
		Supardi, SE			
		Effih, ST, M.T			

43	JF P2UPD Utama	-	0	4	-4
TOTAL			43	144	-101

### 3.1.2. Permasalahan Program Penyelenggaraan Pengawasan

Dalam pelaksanaan pemeriksaan/pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko menghadapi berbagai permasalahan antara lain :

1. Belum Optimalnya kompetensi Sumber Daya Manusia APIP, baik auditor (JFA/ PPUPD) maupun pendukung pelaksanaan pengawasan.
2. Belum Tertatanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
3. Rendahnya kepatuhan Perangkat Daerah, Desa dan Sekolah dalam penyelesaian rekomendasi temuan Hasil Pemeriksaan
4. Banyaknya temuan hasil pemeriksaan yang berulang setiap periode pemeriksaan;
5. Banyaknya kasus dan atau pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti;
6. Rendahnya nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) SAKIP Kabupaten Mukomuko;
7. Rendahnya Nilai Pada Area Intervensi APIP dan Sub Indikator Pengawasan Pada 8 Area Intervensi MCP.

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Jumlah Auditor dengan Jumlah Objek Pemeriksaan**

Ketersediaan Auditor (JFA / PPUPD)	Jumlah Objek pemeriksaan					Jumlah	perbandingan Auditor dengan Obrik
	Perangkat Daerah	Kecamatan	Puskesmas	Desa/ Kelurahan	Sekolah		
31	27	15	17	150	190	399	1:11

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah auditor (JFA/PPUPD) masih sangat kurang untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap Perangkat Daerah, Desa Kelurahan dan Sekolah sebagai mandat dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. 1 (satu) auditor (JFA/PPUPD) harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 11 (sebelas) objek pemeriksaan setiap tahunnya. Selain melaksanakan pengawasan seperti di atas, APIP juga harus melaksanakan pengawasan yang bersifat mandatoris sebagai amanat yang dituang dalam Rencana Pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri. Pengawasan tersebut dapat

berupa audit/pemeriksaan, evaluasi, reuiu, monitoring, asistensi dan consulting dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai Quality Assurance (Penjamin Mutu) atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Fungsi Inspektorat Daerah. Seperti pada table berikut ini.

**Tabel 3.3**  
**Tugas Pengawasan APIP yang bersifat Mandatoris**

No	Uraian Tugas	Jumlah Dokumen	keterangan
1	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIPDA)	1 Dokumen	Sudah dilaksanakan setiap tahun
2	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Sudah dilaksanakan setiap tahun
3	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 Dokumen	Sudah dilaksanakan setiap tahun
5	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa dan Realisasi Anggaran	4 Dokumen	Sudah dilaksanakan setiap tahun
6	Reviu Dana Alokasi khusus (DAK)	4 Dokumen	Sudah dilaksanakan setiap tahun
7	Reviu Perencanaan Daerah	7 Dokumen	Sudah dilaksanakan setiap tahun
8	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	27 Dokumen	Sudah dilaksanakan setiap tahun
9	Probity Audit	Minimal 5 dokumen	Belum dilaksanakan
10	Reviu SSH	1 dokumen	Belum dilaksanakan
11	Reviu ASB	1 Dokumen	Belum dilaksanakan
12	Reviu HSPK	1 Dokumen	Belum dilaksanakan
13	Reviu Kepatuhan BMD	1 Dokumen	Belum dilaksanakan
14	Reviu Kinerja UKPBJ	1 Dokumen	Belum dilaksanakan

Beratnya tugas yang diemban oleh APIP tidak didukung dengan sarana dan prasarana dan anggaran yang memadai oleh Pemerintah Daerah. Seharusnya sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan anggaran untuk Inspektorat sebesar 1 % dari APBD dan peningkatan kompetensi 120 jam/auditor/tahun.

Selain melakukan hal tersebut di atas APIP juga harus melakukan monitoring terhadap kemajuan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, APIP Daerah dan APIP Propinsi. Rendahnya kesadaran Perangkat Daerah, Desa, Kelurahan dan Sekolah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, sehingga tugas APIP semakin berat untuk melakukan monitoring dan evaluasi setiap semesternya.

Selain melakukan pengawasan Internal, APIP juga melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap laporan masyarakat, Limphan dari pemerintah pusat. Sehingga beban kerja APIP semakin berat dengan jumlah yang sedikit dan kurangnya kompetensi APIP untuk melaksanakan tugas – tugas khusus keahlian seperti investigasi terhadap kasus atas laporan dari masyarakat.

### **3.1.3. Permasalahan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.**

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas Kinerja dan tata Kelola Keuangan Daerah untuk mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*). Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko melakukan tugas pendampingan dan asistensi kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi yang merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu APIP sebagai perpanjangan tangan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah juga melakukan pendampingan, monitoring aksi pencegahan korupsi terhadap delapan (8) area intervensi *Monitoring Centre for Prevention (MCP)*. Dalam melaksanakan tugas pendampingan dan asistensi tersebut APIP menghadapi berbagai permasalahan antara lain :

1. Kurang bersinerginya Pemerintah Daerah melalui instansi terkait dalam mengkoordinir penilaian mandiri Reformasi Birokrasi dan pemenuhan area intervensi MCP.
2. Kurangnya kesadaran Perangkat Daerah dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi
3. Sering terjadinya Mutasi dan rotasi terhadap pejabat atau pegawai di lingkungan pemerintah daerah
4. Kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sementara itu, Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dapat dilihat pada isian Tabel 3.4 berikut ini :

**Tabel 3.4**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**  
**Bappelitbangda Kabupaten Mukomuko**

No	Aspek Kajian	Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan
				Internal	Eksternal	
1	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	TL Inspektorat Daerah Kabupaten : 50 %	Matrik Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten	Pemantauan tindak lanjut dan Rapat Koordinasi Pengawasan secara berkala	Respon Objek Pemeriksaan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko	Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan
		TL Inspektorat Provinsi : 98 %	Matrik Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten			
		TL BPK: 70 %	Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK			

<b>2</b>	Nilai Sakip	Nilai Sakip "C"	Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan secara berkala	Komitmen seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Mukomuko	Tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya.
<b>3</b>	Opini BPK	Opini BPK "WTP"	Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD oleh BPK	Pendampingan dan asistensi secara berkala	Komitmen seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Mukomuko	Pengelolaan Keuangan, Aset, dan Pendapatan yang belum memadai
<b>4</b>	Level Kapabilitas APIP	Level 3 dengan Catatan (level 2 +)	Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 3 oleh BPKP	Komitmen dankompetensi API P	Dukungan Pimpinan Daerah	Terbatasnya jumlah SDM pemeriksa dankurangnya kompetensi SDM pemeriksa.
<b>5</b>	Nilai Maturitas SPIP	Level "rintisan" dengan nilai 1,871	Laporan Hasil Pelaksanaan QA atas self assesment Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP	Kompetensi tentang SPIP	Komitmen seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Mukomuko	Masih lemahnya pengendalian intern yang disertai pemantauan secara rutin
<b>6</b>	Indeks Reformasi Birokrasi	46,27 dengan Kategori C	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Mengintensifkan Tim PMPRB	Komitmen seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Mukomuko	Penerapan reformasi birokrasi secara formal di Tingkat Instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.

7	Nilai <i>progress</i> pencapaian <i>Monitoring and Centre for Prevention</i> (MCP)	43%	Laporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah oleh KPK	Kompetensi Tim MCP	Komitmen seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemkab Mukomuko	Belum terpenuhinya target pada 8 area Intervensi MCP sesuai dengan Indikator dan sub Indikator yang telah ditetapkan oleh KPK RI
---	--	-----	--	--------------------	--	--

### 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yaitu:

***“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomuko Yang Maju, Mandiri, Berkarakter Dan Sejahtera Berbasis Agro, Perikanan Dan Berilmu Pengetahuan & Teknologi (Iptek) Serta Beriman & Bertaqwa (Imtaq)”***

Untuk mencapai Visi tersebut dilaksanakan melalui 5 Misi, yaitu:

1. Menjadikan Kabupaten Mukomuko sebagai pusat agroindustri, perdagangan Hasil pertanian, serta perikanan dan kelautan;
2. Meningkatkan mutu pembelajaran yang berbasis pada Iptek melalui Peningkatan profesionalisme dan kompetensi guru, yang didukung Oleh sarana dan prasarana yang berstandar pada standar pendidikan Nasional;
3. Menjalankan Pemerintahan Yang Profesional, Amanah Dan Transparan;
4. Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan setiap elemen Masyarakat;
5. Menjadikan Kabupaten Mukomuko sebagai daerah yang peduli dan Mensinkronkan pembangunan bidang Iptek dan Imtaq;

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko, dengan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini:



**Tabel 3.5**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat**  
**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil**  
**Kepala Daerah**

Visi:	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomuko Yang Maju, Mandiri, Berkarakter Dan Sejahtera Berbasis Agro, Perikanan Dan Berilmu Pengetahuan & Teknologi (Iptek) Serta Beriman & Bertaqwa (Imtaq)				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih Tabel pengham		Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1.	Misi 3.	Menjalankan Pemerintahan Yang Profesional, Amanah Dan Transparan;	Rendahnya nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Mukomuko	belum optimalnya penerapan SAKIP pada komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal.	Komitmen dari Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya Peningkatan Nilai SAKIP
			Belum Optimalnya kompetensi Sumber Daya Manusia APIP, baik auditor (JFA/ PPUPD) maupun pendukung pelaksanaan pengawasan	Kurangnya kesempatan untuk Auditor (JFA/PPUPD) mendapatkan peningkatan kompetensi baik untuk penjenjangan maupun diklat keahlian	Dengan hubungan yang baik dengan Instansi pengawasan Vertikal (BPKP, BPK, KPK) memungkinkan untuk memdapatkan kesempatan peningkatan Kompetensi, melalui Diklat keahlian atau workshop, seminar yang dibiayai oleh Instansi penyelenggara
			Belum Tertatanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Kurangnya Sarana dan Prasarana Pengarsipan, Perlunya aplikasi untuk mempermudah penataan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Perlunya Ruang Pengarsipan untuk menjamin data, dokumen dan Laporan tersimpan dengan baik	
2.			Rendahnya kepatuhan Perangkat Daerah, Desa dan Sekolah dalam penyelesaian rekomendasi temuan Hasil Pemeriksaan	Kurangnya kesadaran dari auditi perangkat Daerah, Sekolah, dan Desa dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan	Perjanjian Kerja Sama APIP dan APH untuk menagih kerugian negara, sehingga mendorong Perangkat Daerah, Desa dan Sekolah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Hasil pemeriksaan
					Badan Pemeriksa Keuangan melakukan monitoring secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan tindak lanjut hasil temuan

Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi suatu bahan perumusan isu pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko.

### 3.3 Telaah Renstra Kabupaten Mukomuko

Faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong dari pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko dapat dilihat pada Tabel 3.6 pada berikut ini :

**Tabel 3.6**  
**Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Berdasarkan Renstra Inspektorat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Pananganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra INSPEKTORAT	Permasalahan Pelayanan INSPEKTORAT	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya tata kelola kinerja Perangkat Daerah	Belum Optimalnya kompetensi Sumber Daya Manusia APIP, baik auditor (JFA/PPUPD) maupun pendukung pelaksanaan pengawasan	Kurangnya kesempatan untuk Auditor (JFA/PPUPD) mendapatkan peningkatan kompetensi baik untuk penjenjangan maupun diklat keahlian	Dengan hubungan yang baik dengan Instansi pengawasan Vertikal (BPKP, BPK, KPK) memungkinkan untuk mendapatkan kesempatan peningkatan Kompetensi, melalui Diklat keahlian atau workshop, seminar yang dibiayai oleh Instansi penyelenggara
		Belum Tertatanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Kurangnya Sarana dan Prasarana Pengarsipan, Perlunya aplikasi untuk mempermudah penataan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Perlunya Ruang Pengarsipan untuk menjamin data, dokumen dan Laporan tersimpan dengan baik	
2	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Menindaklanjuti Temuan Pemeriksaan	Rendahnya kepatuhan Perangkat Daerah, Desa dan Sekolah dalam penyelesaian rekomendasi temuan Hasil Pemeriksaan	Kurangnya kesadaran dari auditi perangkat Daerah, Sekolah, dan Desa dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan	Perjanjian Kerja Sama APIP dan APH untuk menagih kerugian negara, sehingga mendorong Perangkat Daerah, Desa dan Sekolah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Hasil pemeriksaan
				Badan Pemeriksa Keuangan melakukan monitoring secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan tindak lanjut hasil temuan

3	Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Internal	Banyaknya temuan hasil pemeriksaan yang berulang setiap periode pemeriksaan	Kurangnya kesadaran dari auditi perangkat Daerah, Sekolah, dan Desa dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan	menjadikan temuan berulang sebagai indikator keberhasilan pembinaan, sehingga tetap terpantau setiap tahunnya
4	Meningkatnya Persentase Kasus Pengaduan dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tertangani	Banyaknya kasus dan atau pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti	beratnya beban kerja APIP selain melaksanakan tugas yang bersifat mandatori yang tertuang Dalam Program Pengawasan Tahunan (PKPT) juga melaksanakan tugas non PKPT, dengan jumlah ketersediaan SDM yang kompeten, sarana dan prasarana yang terbatas	Komitmen Kepala Daerah dalam Implementasi Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi.
5	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pada SAKIP Daerah	Rendahnya nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) SAKIP Kabupaten Mukomuko	belum optimalnya penerapan SAKIP pada komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal.	Komitmen dari Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya Peningkatan Nilai SAKIP
6	Meningkatnya Nilai Pada Area Intervensi APIP dan Sub Indikator Pengawasan Pada 8 Area Intervensi MCP	Rendahnya Nilai Pada Area Intervensi APIP dan Sub Indikator Pengawasan Pada 8 Area Intervensi MCP	<p>1. Beberapa OPD kurang kooperatif menyampaikan dokumen pendukung yang terkait Target MCP di area intervensi masing-masing</p> <p>2. Pada beberapa Target membutuhkan Sistem / Aplikasi yang mana belum ada Sistem/Aplikasi tersebut serta belum di dukung oleh Anggaran dan Kompetensi SDM</p> <p>3. APIP belum melaksanakan Probity Audit, Reviu SSH, ASB, HSPK, Reviu kepatuhan BMD, reviu kinerja UKPBJ, Reviu kinerja Perizinan, evaluasi Benturan Kepentingan, reviu Totasi Mutasi ASN,</p>	Komitmen Kepala Daerah, Sekda, dan Kepala OPD / Bagian terkait 8 Area Intervensi untuk memenuhi dan mencapai Target MCP 100 %

### 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan tataruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dalam lingkup kawasan/wilayah.

Pada Program kerja Inspektorat Daerah bersifat administrative sehingga tidak terdapat Adapun Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Inspektorat Daerah yang ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun yang menjadi Isu Strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur baik Auditor (JFA dan PPUPD) maupun tenaga pendukung pada Inspektorat Daerah (Kuantitas);
- b. Kapasitas Kompetensi masing-masing Auditor (JFA/PPUPD) baik secara keahlian maupun penjenjangan (kualitas);
- c. Masih rendahnya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan baik hasil pemeriksaan APIP daerah, APIP Provinsi, BPKP dan BPK;
- d. Kurang bersinerginya Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Monitoring dan evaluasi penanganan korupsi terintegrasi;
- f. Peningkatan pengelolaan Laporan Hasil Pemeriksaan sistem informasi yang berbasis IT.

# BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN BADAN INSPEKTORAT DAERAH

### 4.1 Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko

Inspektorat Daerah sebagai perangkat daerah, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Mukomuko yaitu: **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomuko Yang Maju, Mandiri, Berkarakter Dan Sejahtera Berbasis Agro, Perikanan Dan Berilmu Pengetahuan & Teknologi (Iptek) Serta Beriman & Bertaqwa (Imtaq) ”** sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko tahun 2021-2026.

Untuk menunjang Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Mukomuko, Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko berperan dalam Misi ke tiga yaitu Menjalankan Pemerintahan Yang Profesional, Amanah dan Transparan.

### 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko

Sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Lebih jelasnya, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

**TABEL 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah**

KODE	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Pada Akhir Renstra	
					2021	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>											
	Tujuan : Meningkatnya tata kelola kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat	Nilai	BB	BB	BB	A	A	AA		INSPEKTORAT
	Sasaran : Meningkatnya tata kelola kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat	Nilai	BB	BB	BB	A	A	AA		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko	Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang di laksanakan	Jumlah/Jenis Kegiatan	17	17	17	17	17	17	17	
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	70	70	70	70	70	70	70	
		Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang disusun	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	17	40	60	75	86	91	91	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang disusun	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	3	3	3	4	16	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dokumen	3	3	3	3	3	3	15	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja dan Evaluasi Renstra	Dokumen	2	2	2	2	2	2	10	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang di laksanakan	Jenis	2	2	2	2	2	50		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Orang	50	50	50	50	50	50	250	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD.	Jumlah pegawai yang melakukan Penatausahaan, pengujian/Verifikasi Keuangan	orang	16	16	16	16	16	16	80	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	17%	40%	60%	75%	86%	91	91	

KODE	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Pada Akhir Renstra	
					2021	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi.	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	8	12	12	12	15	15	74	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang di laksanakan</b>	Jenis	7	7	7	7	7			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Jenis	5	5	5	5	5	5	30	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	3	3	3	3	3	3	18	
	Penyediaan Peralatan rumah Tangga.	Jumlah Penyediaan Peralatan rumah Tangga.	Jenis	10	10	10	10	10	10	60	
	Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggadaan.	Jumlah Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggadaan.	Jenis	2	2	2	2	2	2	12	
	Penyediaan Bahan dan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Penyediaan Bahan dan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jenis	2	2	2	2	2	2	12	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Pelayanan fasilitas kunj	Jenis	7	7	7	7	7	7	42	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kali	31	31	31	31	40	40	204	
		Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah	Kali	61	61	61	61	90	90	424	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik</b>	<b>Persen</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	8	4	4	4	4	4	28	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung pendukung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan Meubeleur	Unit	0	2	2	2	4	4	14	
	<b>Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang di laksanakan</b>	<b>Jenis</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		

KODE	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Pada Akhir Renstra	
					2021	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah Penyediaan Materai	Materai	225	225	225	225	350	350	1600	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu pembiayaan untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12	72	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor.	Jumlah Orang Pelayanan Jasa Umum yang mendapatkan Honorarium	Orang	8	8	8	8	10	10	52	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik</b>	<b>Persen</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Kendaraan yang mendapatkan Pemeliharaan dan pajak yang dibayar	Jenis	2	2	2	2	2	2	12	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang mendapat Pemeliharaan	Jenis	4	4	4	4	4	4	24	
	<b>Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Tata Kelola Keuangan, Kinerja Pembinaan serta pengawasan internal</b>	<b>Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP Daerah</b>	<b>Nilai</b>	<b>6,68</b>	<b>7</b>	<b>7,5</b>	<b>8</b>	<b>8,5</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	
		<b>Nilai Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi/Monitoring Centre For Prevention</b>	<b>Nilai</b>	<b>43,3</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	
		<b>Persentase Tindak Lanjut Temuan</b>	<b>Persen</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>74</b>	<b>82,6</b>	<b>86,6</b>	<b>91,6</b>	<b>91,6</b>	
		<b>Persentase Temuan Berulang</b>	<b>Persen</b>	<b>-</b>	<b>80</b>	<b>70</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	
		<b>Persentase Pengaduan Masyarakat/Laporan/Limpahan dari Pemerintah Pusat yang dilakukan Pemeriksaan</b>	<b>Persen</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b>Sasaran 1 : Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Menindaklanjuti Temuan Pemeriksaan</b>	<b>Persentase TL APIP</b>	<b>Persen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	
		<b>Persentase TL BPK</b>	<b>Persen</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>72</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	
		<b>Persentase TL Inspektorat Provinsi</b>	<b>Persen</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b>Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Internal</b>	<b>Persentase Temuan Berulang</b>	<b>Persen</b>	<b>-</b>	<b>80</b>	<b>70</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	
	<b>Sasaran 3: Meningkatnya Persentase Kasus Pengaduan dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tertangani</b>	<b>Persentase Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persen</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b>Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pada SAKIP Daerah</b>	<b>Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP Daerah</b>	<b>Nilai</b>	<b>6,68</b>	<b>7</b>	<b>7,5</b>	<b>8</b>	<b>8,5</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	



KODE	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Pada Akhir Renstra	
					2021	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah Perangkat Daerah, Puskesmas, Sekolah dan Desa yang dilakukan Pemeriksaan, Reviu, Monitoring dan Evaluasi	Perangkat Daerah, Sekolah dan Desa	179	179	179	267	179	179	983	
		Persentase TL APIP	Persentase	50	50	70	80	90	100	100	
		Persentase TL BPK	Persentase	70	70	72	75	80	85	85	
		Persentase TL Inspektorat Provinsi	Persentase	90	90	90	100	100	100	100	
		Persentase Temuan Berulang	Temuan	-	80	70	60	50	40	40	
		Persentase Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase	60	60	70	80	90	100	100	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan, Reviu, Monitoring dan Evaluasi	Laporan	332	332	332	332	360	334	1690	
		Persentase TL APIP	Persentase	50	50	60	70	80	90	90	
		Persentase TL BPK	Persentase	70	70	73	75	80	85	85	
		Persentase TL Inspektorat Provinsi	Persentase	90	90	90	90	90	90	90	
	Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	42	125	125	125	125	125	625	
		Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Sakip Perangkat Daerah	Dokumen	27	27	27	27	27	27	135	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	125	27	27	27	27	27	135	
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reviu LAKIPDA, LPPD dan Reviu Perencanaan	Dokumen	10	8	8	8	8	10	42	
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu DAK dan Reviu PBJ	Dokumen	9	9	9	9	9	9	45	

KODE	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Pada Akhir Renstra	
					2021	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	Pengawasan Desa	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Desa	Dokumen	120	120	120	120	148	120	628	
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama Pengawasan Internal (Saber Pungli)	Dokumen	12	12	12	12	12	12	60	
	Monitoring dan Evaluasi tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP, fasilitasi TPKD dan SIMHP	Dokumen	4	4	4	4	4	4	20	
	Penyelegaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Persentase Pengaduan Masyarakat/Laporan/Limpahan dari Pemerintah Pusat yang dilakukakan Pemeriksaan	Persen	60	60	70	70	90	100	100	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pennganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Dokumen	4	4	4	4	4	4	100	
	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Dokumen	10	10	10	10	13	15	100	
	Sasaran 5: Meningkatnya Nilai Pada Area Intervensi APIP dan Sub Indikator Pengawasan Pada 8 Area Intervensi MCP	Nilai Pada Area Intervensi APIP dan Sub Indikator Pengawasan Pada 8 Area Intervensi MCP	Persen	31,22	40	45	50	60	70	70	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	2	3	3,2	3,5	3,7	4	4	
		Tingkat Maturitas SPIP	Nilai	1,87	2+	3	3,2	3,5	3,7	3,7	
		Nilai Monitoring Center Of Prevention	Nilai	43	50	60	70	80	90	90	
		Persentase Tingkat Kepatuhan ASN (pejabat Eselon III dan IV) dalam penyampaian laporan Harta Kekayaan	Persen	30	50	60	70	80	100	100	
		Persentase Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Negara dalam menyampaikan Laporan Hasil Kekavaan	Persen	98	100	100	100	100	100	100	
		Nilai Penilaian Mandiri RB	Nilai	65	68	70	72	75	77	77	
	Perumusan Kebijakan Tekhnis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan	Dokumen	7	7	7	7	7	7	35	
	Perumusan Kebijakan Tekhnis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan	Dokumen	7	7	7	7	7	7	35	
	Perumusan Kebijakan Tekhnis di Bidang fasilitasi Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri	Kali	5	5	5	5	6	6	27	
		fasilitasi penyusunan angka kredit	kali	2	2	2	2	2	2	10	

KODE	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Pada Akhir Renstra	
					2021	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
		Fasilitasi Koordinasi Pengawasan	Kali	1	1	1	1	1	1	5	
	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Persentase ASN Eselon III dan IV yang mengisi LHKASN</b>	Persen	40	50	70	80	90	30	100	
		<b>Persentase Penyelenggara Negara yang mengisi LHKPN</b>	Persen	98	100	100	100	100	100	100	
		<b>Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Risk Register</b>	Persen	40	50	70	80	90	100	50	
		<b>Persentase Unit RB yang dilakukan Evaluasi PMPRB</b>	Persen	40	40	40	40	40	40	40	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.	Tingkat Kapabilitas APIP	<b>Level</b>	2	<b>3</b>	3,2	3,5	3,7	4	4	
		Tingkat Maturitas SPIP	<b>Nilai</b>	1,87	<b>2+</b>	3	3,2	3,4	3,6	3,6	
		Jumlah Elemen IACM yang harus dipenuhi	Elemen	6	6	6	6	6	6	6	
		Jumlah ASN Eselon III dan IV yang mengisi LHKASN	Orang	100	130	150	180	200	250	250	
		Jumlah Penyelenggara Negara yang mengisi LHKPN	Orang	57	70	75	80	85	90	90	
		Jumlah Dokumen Risk Register Perangkat Daerah	Dokumen	27	27	27	27	27			
	Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.	Jumlah Perangkat daerah yang membangun RB	Perangkat Daerah	9	9	9	9	9	9	45	
	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.	Jumlah Laporan MCP	Dokumen	4	4	4	4	4	4	20	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.	Jumlah Laopran Penegakan Integritas	dokumen	-	1	1	1	1	1	5	

# BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INSPEKTORAT DAERAH

Mengacu pada Visi, Misi serta tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Mukomuko, maka Strategi dan Kebijakan jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

▪ <b>Visi</b>	:	<b>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomuko yang Maju Mandiri, Berkarakter dan sejahtera Berbasis Agro, Perikanan dan Berilmu Pengetahuan beriman dan beertaqwa (IMTAQ)"</b>
▪ <b>Misi 3</b>	:	<b>Menjalankan Pemerintahan Yang Profesional, Amanah dan Transparan</b>
Tujuan 1	:	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah
Tujuan 2	:	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Tata Kelola Keuangan, Kinerja Pembinaan serta pengawasan internal

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1

## Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomuko yang Maju Mandiri, Berkarakter dan sejahtera Berbasis Agro, Perikanan dan Berilmu Pengetahuan beriman dan beertaqwa (IMTAQ)"

Misi 3 : Menjalankan Pemerintahan Yang Profesional, Amanah dan Transparan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah	Membuat Perjanjian Kerjasama dengan pihak penyelenggara diklat seperti BPKP dan Badan Diklat Kemendagri	Perjanjian Kerjasama dengan pihak penyelenggara diklat seperti BPKP dan Badan Diklat Kemendagri
		Mengajukan Anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku untuk Pelaksanaan Diklat	Pengajuan Anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku untuk Pelaksanaan Diklat
		Mengajukan Anggaran untuk pembangunan Ruang Arsip	Pengajuan Anggaran untuk pembangunan Ruang Arsip
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Tata Kelola Keuangan, Kinerja Pembinaan serta pengawasan internal	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pada SAKIP Daerah	Mendorong Pemerintah Daerah dengan Perangkat Daerah menandatangani Pakta Integritas tentang peningkatan Evaluasi SAKIP	Penandatanganan Pakta Integritas peningkatan Evaluasi SAKIP
	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Menindaklanjuti Temuan Pemeriksaan	Mendorong Pemerintah Daerah dengan Perangkat Daerah menandatangani Pakta Integritas tentang Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan	Pemberian Reward kepada Perangkat Daerah yang Menyelesaikan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan dan Memberikan Punishment kepada Perangkat Daerah Yang Tidak menyelesaikan Tindak Lanjut Temuan
		Menyediakan Sistem Aplikasi Monitoring Tindak Lanjut Temuan APIP, BPK, dan Inspektorat Provinsi	Penyediaan Sistem Aplikasi Monitoring Tindak Lanjut Temuan APIP, BPK, dan Inspektorat Provinsi
	Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Internal	Mengajukan Anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku untuk Pelaksanaan Diklat	Pengajuan Anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku untuk Pelaksanaan Diklat
Menyediakan Ruang Konsultasi untuk Perangkat Daerah		Penyediaan Ruang Konsultasi Perangkat Daerah	

Meningkatnya Persentase Kasus Pengaduan dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tertangani	Mengajukan Usulan Penambahan Jumlah Sumber Daya Manusia (CPNS)	Pengajuan Usulan Penambahan Jumlah Sumber Daya Manusia (CPNS)
	Mengajukan Anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku untuk Pelaksanaan Diklat	Pengajuan Anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku untuk Pelaksanaan Diklat
Meningkatnya Nilai Pada Area Intervensi APIP dan Sub Indikator Pengawasan Pada 8 Area Intervensi MCP	Mendorong Pemerintah Daerah dengan Perangkat Daerah menandatangani Pakta Integritas tentang Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan	Penandatanganan Pakta Integritas tentang Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan
	Menyediakan Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat dan <i>Whistleblowing System</i>	Penyediaan Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat dan <i>Whistleblowing System</i>
	Membuat Perjanjian Kerjasama dengan BPKP tentang Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Quality Assurance atas Pelaksanaan Reviu, Audit Yang di Targetkan dalam MCP	Perjanjian Kerjasama dengan BPKP tentang Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Quality Assurance atas Pelaksanaan Reviu, Audit Yang di Targetkan dalam MCP

# **BAB VI**

## **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT DAERAH**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026, lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.1 pada halaman Bab VI-2.

**TABEL 6**  
**RENCANA PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**  
**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

KODE	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Pada Akhir Renstra		
					2021	TARGET Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																	
	Tujuan : Meningkatnya tata kelola kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat	Nilai	BB	BB	BB	BB	4	4	4	4	4	4	4	4	INSPEKTORAT	
	Sasaran : Meningkatnya tata kelola kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat	Nilai	BB	BB	BB	BB	4	4	4	4	4	4	4	4	INSPEKTORAT	
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko</b>	Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang di laksanakan	Jumlah/Jenis Kegiatan	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70		
		Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang disusun	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	17	40	60	60	75	86	91	91	91	91	91	91		
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.</b>	<b>Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang disusun</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>30.125.000</b>	<b>100</b>	<b>30.125.000</b>	<b>100</b>	<b>30.125.000</b>	<b>100</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100</b>	<b>160.375.000</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	12.580.000	3	12.580.000	3	12.580.000	3	15.000.000	4	20.000.000	16	72.740.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dokumen	3	3	12.545.000	3	12.545.000	3	12.545.000	3	15.000.000	3	15.000.000	15	67.635.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja dan Evaluasi Renstra	Dokumen	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	10	25.000.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang di laksanakan</b>	<b>Jenis</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4.667.022.316</b>	<b>2</b>	<b>4.676.064.681</b>	<b>2</b>	<b>4.685.125.130</b>	<b>2</b>	<b>4.694.203.700</b>	<b>50</b>	<b>4.703.300.428</b>	<b>23.425.716.255</b>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Orang	50	50	4.521.182.316	50	4.530.224.681	50	4.539.285.130	50	4.548.363.700	50	4.557.460.428	250	22.696.516.255	
	Pebksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD.	Jumlah pegawai yang melakukan Penatausahaan, pengujian/Verifikasi Keuangan	orang	16	16	145.840.000	16	145.840.000	16	145.840.000	16	145.840.000	16	145.840.000	80	729.200.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya</b>	<b>Persen</b>	<b>17%</b>	<b>40%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>60%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>75%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>86%</b>	<b>192.500.000</b>	<b>91</b>	<b>187.500.000</b>	<b>91</b>	<b>830.000.000</b>	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi.	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	8	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	15	192.500.000	15	187.500.000	74	830.000.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang di laksanakan</b>	<b>Jenis</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>260.902.324</b>	<b>7</b>	<b>263.902.324</b>	<b>7</b>	<b>263.902.324</b>	<b>7</b>	<b>340.160.000</b>		<b>337.960.054</b>	<b>1.466.827.026</b>		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Jenis	5	5	6.999.603	5	6.999.603	5	6.999.603	5	6.999.603	5	6.999.603	30	34.998.015	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	3	3	26.998.455	3	29.998.455	3	29.998.455	3	39.160.965	3	35.000.000	18	161.156.330	
	Penyediaan Peralatan rumah Tangga.	Jumlah Penyediaan Peralatan rumah Tangga.	Jenis	10	10	7.999.932	10	7.999.932	10	7.999.932	10	7.999.932	10	7.999.932	60	39.999.660	



KODE	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Pada Akhir Renstra		
					2021	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	
	Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggadaan.	Jumlah Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggadaan.	Jenis	2	2	29.999.880	2	29.999.880	2	29.999.880	2	32.000.000	2	33.961.019	12	155.960.659	
	Penyediaan Bahan dan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Penyediaan Bahan dan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan.	Jenis	2	2	18.999.500	2	18.999.500	2	18.999.500	2	18.999.500	2	18.999.500	12	94.997.500	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Pelayanan fasilitas kunj	Jenis	7	7	24.967.954	7	24.967.954	7	24.967.954	7	35.000.000	7	35.000.000	42	144.903.862	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kali	31	31	144.937.000	31	144.937.000	31	144.937.000	40	200.000.000	40	200.000.000	204	834.811.000	
		Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah	Kali	61	61		61		61		90		90		424		
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik</b>	<b>Persen</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>60.000.000</b>	<b>80</b>	<b>60.000.000</b>	<b>90</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100</b>	<b>50.000.000</b>	<b>310.000.000</b>		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	8	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	30.000.000	28	230.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung pendukung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan Meubeleur	Unit	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	4	30.000.000	4	20.000.000	14	80.000.000	
	<b>Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang di laksanakan</b>	<b>Jenis</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>143.250.000</b>	<b>3</b>	<b>143.250.000</b>	<b>3</b>	<b>143.250.000</b>	<b>3</b>	<b>183.500.000</b>	<b>3</b>	<b>183.500.000</b>	<b>796.750.000</b>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah Penyediaan Material	Materai	225	225	2.250.000	225	2.250.000	225	2.250.000	350	3.500.000	350	3.500.000	1600	13.750.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu pembiayaan untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	72	255.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor.	Jumlah Orang Pelayanan Jasa Umum yang mendapatkan Honorarium	Orang	8	8	96.000.000	8	96.000.000	8	96.000.000	10	120.000.000	10	120.000.000	52	528.000.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik</b>	<b>Persen</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>82.545.000</b>	<b>70</b>	<b>72.545.000</b>	<b>70</b>	<b>72.545.000</b>	<b>70</b>	<b>88.000.000</b>	<b>88.000.000</b>	<b>88.000.000</b>	<b>403.635.000</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Kendaraan yang mendapatkan Pemeliharaan dan pajak yang dibayar	Jenis	2	2	74.545.000	2	64.545.000	2	64.545.000	2	80.000.000	2	80.000.000	12	363.635.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang mendapat Pemeliharaan	Jenis	4	4	8.000.000	4	8.000.000	4	8.000.000	4	8.000.000	4	8.000.000	24	40.000.000	
	<b>Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Tata Kelola Keuangan, Kinerja Pembinaan serta pengawasan internal</b>	<b>Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP Daerah</b>	<b>Nilai</b>	<b>6,68</b>	<b>7</b>		<b>7,5</b>		<b>8</b>		<b>8,5</b>		<b>9</b>	<b>9</b>			
		<b>Nilai Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi/ Monitoring Centre For Prevention</b>	<b>Nilai</b>	<b>43,3</b>	<b>50</b>		<b>60</b>		<b>65</b>		<b>70</b>		<b>80</b>	<b>80</b>			
		<b>Presentase Tindak Lanjut Temuan</b>	<b>Persen</b>	<b>70</b>	<b>70</b>		<b>74</b>		<b>82,6</b>		<b>86,6</b>		<b>91,6</b>	<b>91,6</b>			
		<b>Persentase Temuan Berulang</b>	<b>Persen</b>	<b>-</b>	<b>80</b>		<b>70</b>		<b>60</b>		<b>50</b>		<b>40</b>	<b>40</b>			
		<b>Persentase Pengaduan Masyarakat/Laporan/Limpahan dari Pemerintah Pusat yang dilakukan Pemeriksaan</b>	<b>Persen</b>	<b>60</b>	<b>60</b>		<b>70</b>		<b>80</b>		<b>90</b>		<b>100</b>	<b>100</b>			

KODE	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Pada Akhir Renstra			
					2021	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET		Rp.
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Menindaklanjuti Temuan Pemeriksaan	Persentase TL APiP	Persen	50	50		60		70		80		90		90			
		Persentase TL BPK	Persen	70	70		72		75		80		85		85			
		Persentase TL Inspektorat Provinsi	Persen	90	90		90		100		100		100		100			
	Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Internal	Persentase Temuan Berulang	Persen	-	80		70		60		50		40		40			
	Sasaran 3: Meningkatnya Persentase Kasus Pengaduan dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tertangani	Persentase Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persen	60	60		70		80		90		100		100			
	Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pada SAKIP Daerah	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP Daerah	Nilai	6,68	7		7,5		8		8,5		9		9			
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah Perangkat Daerah, Puskesmas, Sekolah dan Desa yang dilakukan Pemeriksaan, Reviu, Monitoring dan Evaluasi	Perangkat Daerah, Sekolah dan Desa	179	179		179		267		179		179		983			
		Persentase TL APiP	Persentase	50	50		70		80		90		100		100			
		Persentase TL BPK	Persentase	70	70		72	1.704.337.676	75	1.704.337.676	80	1.940.000.000	85	1.967.200.000	85	8.990.213.028		
		Persentase TL Inspektorat Provinsi	Persentase	90	90		90		100		100		100		100			
		Persentase Temuan Berulang	Temuan	-	80		70		60		50		40		40			
		Persentase Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase	60	60		70		80		90		100		100			
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan, Reviu, Monitoring dan Evaluasi	Laporan	332	332		332		332		360		334		1690			
		Persentase TL APiP	Persentase	50	50		60	1.419.980.000	70	1.429.980.000	80	1.600.000.000	90	1.607.200.000	90	7.487.140.000		
		Persentase TL BPK	Persentase	70	70		73		75		80		85		85			
		Persentase TL Inspektorat Provinsi	Persentase	90	90		90		90		90		90		90			
	Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	42	125		125	500.000.000	125	510.000.000	125	510.000.000	125	510.000.000	625	2.540.000.000		
		Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Sakip Perangkat Daerah	Dokumen	27	27		27		27		27		27		135			
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	125	27		27	60.000.000	27	60.000.000	27	80.000.000	27	80.000.000	135	340.000.000		
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reviu LAKIPDA, LPD dan Reviu Perencanaan	Dokumen	10	8		8	130.000.000	8	130.000.000	8	150.000.000	10	200.000.000	42	740.000.000		
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu DAK dan Reviu PBJ	Dokumen	9	9		9	140.000.000	9	140.000.000	9	170.000.000	9	170.000.000	45	760.000.000		

KODE	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Pada Akhir Renstra		
					2021	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	
	Pengawasan Desa	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Desa	Dokumen	120	120	297.200.000	120	297.200.000	120	297.200.000	148	360.000.000	120	297.200.000	628	1.548.800.000	
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama Pengawasan Internal (Saber Pungli)	Dokumen	12	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	60	750.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP, fasilitasi TPKD dan SIMHP	Dokumen	4	4	142.780.000	4	142.780.000	4	142.780.000	4	180.000.000	4	200.000.000	20	808.340.000	
	Penyelegaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Persentase Pengaduan Masyarakat/Laporan/Limpahan dari Pemerintah Pusat yang dilakukan Pemeriksaan	Persen	60	60	254.357.676	70	274.357.676	70	274.357.676	90	340.000.000	100	360.000.000	100	1.503.073.028	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Dokumen	4	4	120.000.000	4	120.000.000	4	120.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	100	660.000.000	
	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Dokumen	10	10	134.357.676	10	154.357.676	10	154.357.676	13	190.000.000	15	210.000.000	100	843.073.028	
	Sasaran 5: Meningkatnya Nilai Pada Area Intervensi APIP dan Sub Indikator Pengawasan Pada 8 Area Intervensi MCP	Nilai Pada Area Intervensi APIP dan Sub Indikator Pengawasan Pada 8 Area Intervensi MCP	Persen	31,22	40		45		50		60		70		70		
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	2	3		3,2		3,5		3,7		4		4		
		Tingkat Maturitas SPIP	Nilai	1,87	2+		3		3,2		3,5		3,7		3,7		
		Nilai Monitoring Center Of Prevention	Nilai	43	50	453.000.000	60	500.000.000	70	500.000.000	80	550.000.000	90	570.000.000	90	2.573.000.000	
		Persentase Tingkat Kepatuhan ASN (pejabat Eselon III dan IV) dalam menyampaikan laporan Harta Kekayaan	Persen	30	50		60		70		80		100		100		
		Persentase Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Negara dalam menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan	Persen	98	100		100		100		100		100		100		
		Nilai Penilaian Mandiri RB	Nilai	65	68		70		72		75		77		77		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan	Dokumen	7	7	93.000.000	7	95.000.000	7	95.000.000	7	95.000.000	7	110.000.000	35	488.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan	Dokumen	7	7	40.000.000	7	40.000.000	7	40.000.000	7	40.000.000	7	40.000.000	35	200.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang fasilitasi Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri	Kali	5	5		5		5		6		6		27		
		fasilitasi penyusunan angka kredit	kali	2	2	53.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000	2	70.000.000	10	288.000.000	
		Fasilitasi Koordinasi Pengawasan	Kali	1	1		1		1		1		1		5		
	Pendampingan dan Asistensi	Persentase ASN Eselon III dan IV yang mengisi LHKASN	Persen	40	50		70		80		90		30		100		
		Persentase Penyelenggara Negara yang mengisi LHRPN	Persen	98	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Risk Register	Persen	40	50	360.000.000	70	405.000.000	80	405.000.000	90	455.000.000	100	460.000.000	50	2.085.000.000	
		Persentase Unit RB yang dilakukan Evaluasi PMPRB	Persen	40	40		40		40		40		40		40		

KODE	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Pada Akhir Renstra		
					2021	TARGET	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.	Tingkat Kapabilitas APiP	Level	2	3	220.000.000	3,2	250.000.000	3,5	250.000.000	3,7	295.000.000	4	300.000.000	4	1.315.000.000	
		Tingkat Maturitas SPIP	Nilai	1,87	2+		3		3,2		3,4		3,6		3,6		
		Jumlah Elemen IACM yang harus dipenuhi	Ekmen	6	6		6		6		6		6		6		
		Jumlah ASN Eselon III dan IV yang mengisi LHKASN	Orang	100	130		150		180		200		250		250		
		Jumlah Penyelenggara Negara yang mengisi LHKPN	Orang	57	70		75		80		85		90		90		
		Jumlah Dokumen Risk Register Perangkat Daerah	Dokumen	27	27		27		27		27		27		27		
	Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.	Jumlah Perangkat daerah yang membangun RB	Perangkat Daerah	9	9	50.000.000	9	55.000.000	9	55.000.000	9	60.000.000	9	60.000.000	45	280.000.000	
	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.	Jumlah Laporan MCP	Dokumen	4	4	50.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	20	290.000.000	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.	Jumlah Laporan Penegakan Integritas	dokumen	-	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	5	200.000.000	
			JUMLAH			7.521.182.316		7.600.224.681		7.609.285.130		8.098.363.700		8.127.460.482		38.956.516.309	

# **BAB VII**

## **KINERJA PENYELENGGARAAN INSPEKTORAT DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko, Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko menyelenggarakan urusan pengawasan. Urusan Pengawasan memiliki indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pemerintah Jangka Menengah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Daerah dalam 5 tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pemerintah Jangka Menengah Kabupaten Mukomuko. Untuk data indikator Kinerja Penyelenggaraan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1 pada halaman Bab VII-2.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Penyelenggaraan Inspektorat Daerah**  
**Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026**

**VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MUKOMUKO YANG MAJU, MANDIRI, BERKARAKTER DAN SEJAHTERA BERBASIS AGRO, PERIKANAN DAN BERILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI (IPTEK) SERTA BERIMAN & BERTAQWA (IMTAQ) ”**

**Misi 3 : MENJALANKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, AMANAH DAN TRANSPARAN**

**PD : Inspektorat Daerah**

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator Program	Urusan	Penanggung Jawab
Meningkatnya tata kelola kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP	Meningkatnya tata kelola kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang di laksanakan		Inspektorat
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik		
					Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang disusun		
					Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Tata Kelola Keuangan, Kinerja Pembinaan serta pengawasan internal	Nilai komponen evaluasi internal	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pada SAKIP Daerah	Nilai komponen evaluasi internal	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah Perangkat Daerah, Puskesmas, Sekolah dan Desa yang dilakukan Pemeriksaan, Reviu, Monitoring dan Evaluasi	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Inspektorat
					Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP		
					Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK		
					Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Propinsi		

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator Program	Urusan	Penanggung Jawab
	Persentase Temuan Berulang	Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Internal	Penurunan Persentase Temuan Berulang		Penurunan Persentase Temuan Berulang		
	Persentase Pengaduan Masyarakat/Laporan/Limpahan dari Pemerintah Pusat yang dilakukan Pemeriksaan	Meningkatnya Persentase Kasus Pengaduan dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tertangani	Persentase Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Persentase Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Inspektorat
	Nilai Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi/Monitoring Centre For Prevention (MCP)	Meningkatnya Nilai Pada Area Intervensi APIP dan Sub Indikator Pengawasan Pada 8 Area Intervensi MCP	Nilai Pada Area Intervensi APIP dan Sub Indikator Pengawasan Pada 8 Area Intervensi MCP	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Tingkat Kapabilitas APIP		
					Tingkat Maturitas SPIP		
					Nilai Monitoring Center Of Prevention		
					Persentase Tingkat Kepatuhan ASN (pejabat Eselon III dan IV) dalam penyampaian laporan Harta Kekayaan		
					Persentase Tingkat Kepatuhan Penyelenggaran Negara dalam menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan		

# BAB VIII

## PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2020-2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko .

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Perangkat Daerah maupun di lingkup Pemerintah Kota.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Mukomuko 2021-2026 “**TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MUKOMUKO YANG MAJU, MANDIRI, BERKARAKTER DAN SEJAHTERA BERBASIS AGRO, PERIKANAN DAN BERILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI (IPTEK) SERTA BERIMAN & BERTAQWA (IMTAQ)**”.

